

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BEDAH RUMAH DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN**

(Studi pada Desa Giripurno Kota Batu)

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**MELLA AMALIA NUSA**  
**NIM. 145030501111002**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
MINAT ILMU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
MALANG  
2018**

## MOTTO

“Dibalik kesulitan pasti ada kemudahan. *Man Jadda Wajada* bersungguh sungguhlah pasti kalian akan mendapatkannya”



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah dalam  
Rangka Pengentasan Kemiskinan.  
(Studi pada Desa Giripurno Kota Batu)

Disusun Oleh : Mella Amalia Nusa

NIM : 145030501111002

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : Minat Ilmu Administrasi Pemerintahan

Malang, 16 Maret 2017

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing



**Dr. Abdullah Said, M.Si**  
**NIP. 19570911 198503 1 003**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 19 April 2018  
Waktu : 10.00 – 11.00 WIB  
Skripsi Atas Nama : Mella Amalia Nusa  
Judul : Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah dalam  
Rangka Pengentasan Kemiskinan.  
(Studi pada Desa Giripurno Kota Batu)

**Dan dinyatakan LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua

**Dr. Abdullah Said, M.Si****NIP. 19570911 198503 1 003**

Anggota

**Dr. Mochamad Rozikin, M.AP****NIP. 19630503 198802 1 001**

Anggota

**Drs. Stefanus Pani Rengu, M.AP****NIP. 19531113 198212 1 001**

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diprotes sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70.

Malang, 26 Maret 2018



Nama : Mella Amalia Nusa

NIM : 145030501111002



*Kupersembahkan Karyaku  
Kepada Mama dan Papa  
Tercinta atas Kerja Keras dan  
Doanya*

## RINGKASAN

**Mella Amalia Nusa, 2017, Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan (Studi pada Desa Giripurno Kota Batu), Dr. Abdullah Said, M.Si**

---

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang dialami hampir di seluruh negara, baik di negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin Indonesia berjumlah 26,58 juta orang. Dengan melihat jumlah penduduk miskin di Indonesia yang cukup besar, perlu adanya pengentasan kemiskinan yang serius. Dampak dari adanya kemiskinan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang mencakup fisik, psikis, dan sosial. Salah satunya adalah tidak terpenuhinya rumah yang layak untuk di huni. Pemerintah Kota Batu telah membuat sebuah kebijakan program bedah rumah. Program ini merupakan bantuan dana yang diberikan kepada masyarakat miskin untuk merehab rumahnya menjadi layak huni. Namun berdasarkan hasil pra penelitian yang telah peneliti lakukan, masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh pemerintah. Masalahnya terdapat dalam tahap implementasi dimana banyak ditemukan pelaksanaan program bedah rumah masih tidak sesuai dengan perencanaan awal, seperti rumah warga yang menerima program bedah rumah dan memperoleh anggaran untuk merehab lantainya yang masih tanah, namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan pembatasan fokus yang diambil berdasarkan teori Charles O'Jones yang meliputi organisasi, interpretasi dan penerapan. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program bedah rumah di Desa Giripurno Kota Batu secara umum telah mencerminkan suatu upaya pemerintah untuk melakukan pengentasan kemiskinan namun dalam tahap implementasi belum berjalan baik. kurangnya keterlibatan pihak-pihak yang terkait dengan program bedah rumah menjadi pelaksana, Nominal yang diberikan terkadang masih kurang untuk merehab rumah.

Kata Kunci: Implementasi, Program Bedah Rumah, Kemiskinan



## SUMMARY

### **Mella Amalia Nusa, 2017, Implementation of House Surgery Program Policy in the Framework of Poverty Alleviation (Study on Giripurno Subdistrict, Batu City), Dr. Abdullah Said, M.Si**

---

Poverty is the most developed social issue in all countries, both in developed and developing countries such as Indonesia. Based on the condition conducted by the Central Bureau of Statistics (BPS) in 2017, the number of poor people of Indonesia 26.58 million people. By looking at the number of poor people in Indonesia is quite large, the need for serious poverty eradication. The impact of the heat does not fulfill the basic human needs that include physical, psychological, and social. One of them is not suitable for the house to live in. So that the issues about housing establishment is the responsibility of the central government and local governments. Batu City Government has made a house surgery program. This program is government's did which given to the poor tp rehabilitate theit house for granted. However, based on the results of pre-research that have been done by the researcher, there are still some things that are not in accordance with the guidelines provided by the government. The problem lies in the implementation stage where many found the implementation of the home surgery program is still not in accordance with the initial planning, such as the house owner whom receive surgery program and accept the budget to rehabilitate the ground floor, but on the implementation is not done.

This research use descriptive research type with qualitative approach and taken based on Charles O'Jones theory which includes organization, interpretation and application. Data obtained through observation, interview and field documentation.

The results of this study indicate that the implementation of the policy of house surgery program in Giripurno Subdistrict Batu City has not gone well. The problem of unsuitable planning due to lack of involvement of stakeholders related to home surgery program to be executor. Nominal given sometimes still lacking to rehabilitate the house.

Keywords: Implementation, House Surgery Program, Poverty



## KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan (Studi di Desa Giripurno Kota Batu)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik pada Minat Ilmu Administrasi Pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Dr. Luqman Hakim, M.Sc., selaku Ketua Minat Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Dr. Abdullah Said, M.Si selaku Ketua Komisi Pemimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan baik secara teknis, teoritis maupun moril sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak Nasikin dan Ibu Suwartini, selaku orang tua dari penulis yang telah memberikan doa dan dukungan moral serta dukungan materi kepada penulis selama penyusunan skripsi.
7. Bapak Ir. Mohammad Dakkir, MM selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu, Bapak Mochamad Naseh Lukman, ST.MM selaku Kepala Seksi Perumahan Kota Batu, Bapak Supeno selaku Kasi Kesra Desa Giripurno, Bapak Tabri sebagai Bendahara panitia program bedah rumah di Dusun Sawahan RT 12 RW 03, Bapak Supriyadi selaku Bendahara panitia program bedah rumah di Dusun Krajan RT 41 RW 06, Ibu Siani dan Ibu Trikuri selaku penerima bantuan program bedah rumah di Desa Giripurno Kota Batu yang telah memberikan informasi kepada penulis selama penelitian.
8. Sahabat-Sahabatku “Ciwi-Ciwi Ngalam” Desi, Diva, Dwi, Nadia dan Riza yang setiap saat memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi.
9. Teman-teman mahasiswa Minat Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya angkatan 2014 yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan studinya.
10. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 3 Maret 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

MOTTO .....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
ORISINALITAS SKRIPSI .....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	vi
RINGKASAN .....	vii
SUMMARY .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kontribusi Penelitian .....	10
1. Kontribusi Akademis .....	10
2. Kontribusi Praktis .....	10
E. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kebijakan Publik .....	13
1. Pengertian Kebijakan Publik .....	13
2. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik .....	15
3. Faktor Pendukung dan Penghambat .....	16
4. Hubungan Kebijakan dengan Program .....	18
B. Program .....	20
1. Pengertian Program .....	20
2. Macam-macam Program .....	22
3. Implementasi Program .....	23
C. Kemiskinan .....	25
1. Pengertian Kemiskinan .....	25
2. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan .....	28
3. Indikator Kemiskinan .....	30
D. Rumah .....	32
1. Definisi Rumah dan Perumahan .....	32
2. Fungsi Rumah .....	34
E. Deskripsi Program Bedah Rumah .....	37

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Fokus Penelitian .....	40
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	42
D. Sumber Data.....	43
1. Data Primer.....	43
2. Data Sekunder .....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
1. Wawancara .....	45
2. Obsevarsi .....	45
3. Dokumentasi.....	45
F. Instrumen Penelitian.....	46
1. Peneliti.....	46
2. Pedoman Wawancara .....	47
3. Perangkat Penunjang .....	47
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	48
1. Tahap Pra Lapangan .....	48
2. Tahap Pekerjaan Lapangan.....	48
3. Tahap Analisis Data .....	48
H. Analisis Data .....	49

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian .....	52
1. Gambaran Umum Kota Batu .....	52
2. Gambaran Umum Situs Penelitian .....	57
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	64
1. Implementasi Program Bedah Rumah yang masih tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaa di Desa Giripurno Kota Batu.....	64
a. Organisasi.....	64
b. Interpretasi.....	72
c. Penerapan .....	81
C. Analisis Data .....	97
1. Implementasi Program Bedah Rumah yang masih tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaa di Desa Giripurno Kota Batu.....	99
a. Organisasi.....	99
b. Interpretasi.....	102
c. Penerapan .....	106

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Program Bedah .....	6
Tabel 1.2 Rekapitulasi Penerima Bantuan Program Bedah Rumah Tahun 2017 .....	7
Tabel 4.1 Jumlah Luas Wilayah, Kelurahan/Desa dan Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan di Kota Batu Tahun 2016 .....	54
Tabel 4.2 Petinggi di Desa Giripurno .....	59
Tabel 4.3 Karakteristik Penduduk Berdasarkan Usia .....	61
Tabel 4.4 Karakteristik Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	62
Tabel 4.5 Data Sarana Pendidikan Formal di Desa Giripurno .....	63
Tabel 4.6 Data Sarana Pendidikan Non Formal di Desa Giripurno .....	63
Tabel 4.7 Data Penerima Program Bedah Rumah di Desa Giripurno Kota Batu .....	79





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sekunesi Implementasi Kebijakan .....	15
Gambat 2.2 Lingkaran Setan Kemiskinan .....	30
Gambar 4.1 Peta Kota Batu.....	52
Gambar 4.2 Rumah Ibu Siani sebelum menerima bantuan program bedah rumah .....	91
Gambar 4.3 Rumah Ibu Siani setelah menerima bantuan program bedah rumah .....	91
Gambar 4.4 Kondisi Rumah Ibu Siani setalah mendapat bantuan Program bedah rumah .....	92
Gambar 4.5 Kondisi Rumah Ibu Trikuri sebelum mendapat bantuan Program bedah rumah .....	92
Gambar 4.6 Kondisi Rumah Ibu Trikuri setelah mendapat bantuan program bedah rumah .....	93
Gambar 4.7 Kondisi Rumah Ibu Siani setalah mendapat bantuan program bedah rumah .....	94
Gambar 4.8 Kondisi Rumah Ibu Siani setelah mendapat bantuan program bedah rumah .....	94
Gambar 4.9 Alur prosedur pemberian dana bantuan bedah rumah.....	107

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Permasalahan sosial yang sangat kompleks salah satunya adalah kemiskinan. Dari tahun ke tahun kemiskinan menjadi topik yang sangat menarik dan hangat untuk dibahas karena tidak hanya menyangkut kehidupan seseorang, namun menyangkut juga terhadap keluarga, kelompok, dan masyarakat yang sangat luas. Selain itu, kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Selama ini sudah banyak dilakukan studi dan kajian tentang kemiskinan, namun jawaban atas pengertian kemiskinan dan penyebab kemiskinan masih menjadi perdebatan para ahli.

Kemiskinan memiliki banyak definisi yang sebagian orang memahami istilah tersebut dari perspektif subyektif dan komparatif, sementara sebagian orang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif. Meskipun sebagian besar konsepsi kemiskinan seringkali dikaitkan dengan aspek ekonomi, tetapi hakikatnya kemiskinan juga menyangkut dimensi material, sosial, kultural, institusional dan struktural (Suharto, 2009:15).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup ataupun akibat ketidakmampuan negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada

masyarakatnya. Oleh karena itu, semua negara di dunia ini sepakat bahwa kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban. Semua umat manusia di bumi ini setuju bahwa kemiskinan adalah hal yang wajib dan harus bisa dituntaskan.

Pada kenyataannya, saat ini kemiskinan bisa saja terjadi baik di negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman dan Inggris bahkan di negara berkembang seperti di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin Indonesia berjumlah 26,58 juta orang. Dengan melihat jumlah penduduk miskin di Indonesia yang cukup besar, perlu adanya pengentasan kemiskinan yang serius.

Dampak dari masalah kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang mencakup kebutuhan fisik, psikis, dan sosial (Nugraha, 2014:2). Salah satunya adalah tidak terpenuhinya rumah yang layak untuk di huni. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H hasil amandemen ke IV dijelaskan bahwa rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembina keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta sebagai aset pemilikinya. Oleh

karena itu setiap rakyat indonesia berhak untuk memiliki rumah karena rumah merupakan salah satu aspek dari kesejahteraan masyarakat yang harus dipenuhi.

Realitanya, untuk mewujudkan rumah yang layak untuk di huni dan sehat untuk ditinggal bukanlah hal yang mudah. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan masyarakat miskin untuk memenuhi rumah layak huni karena kondisi ekonomi yang kurang baik dan pengetahuan tentang rumah yang layak untuk di huni masih terbatas (Arhohim, 2016:2). Sehingga masyarakat miskin kesulitan untuk membangun model rumah yang dianggap layak huni.

Selain itu, penambahan penduduk yang pesat di Indonesia mengakibatkan kebutuhan akan sarana dan prasarana semakin meningkat terutama pada kebutuhan perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar utama. Oleh karena itu jumlah penambahan penduduk juga harus diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan perumahan karena semakin tinggi pertumbuhan penduduk maka semakin tinggi pula kebutuhan masyarakat dalam memperoleh tempat tinggal. Hal ini sebagaimana yang tertulis dalam RPJMN Tahun 2015-2019 bahwa permasalahan pembangunan perumahan di Indonesia masih dihadapkan pada tiga permasalahan pokok, yaitu:

- a. Keterbatasan penyediaan rumah.
- b. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai.
- c. Permukiman kumuh yang semakin meluas.

Permasalahan mengenai rumah yang tidak layak huni yang ada menjadi agenda pembangunan yang harus terealisasi di Indonesia, khususnya bagi masyarakat miskin. Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman termasuk dalam penyelenggaraan kebijakan untuk kepentingan publik dan masalah yang ada pada suatu negara merupakan ruang lingkup dari administrasi publik. Administrasi publik menurut Chandler dan Plano (Keban, 2008:3) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Begitu luasnya kebijakan publik salah satunya adalah mengenai pembangunan.

Pembangunan merupakan salah satu bagian dari administrasi publik. Pengertian pembangunan erat kaitanya dengan pencapaian tujuan pembangunan atau suatu kondisi yang diinginkan. Pembangunan menurut Siagian (Suryono, 2004:21) menyebutkan bahwa pembangunan merupakan usaha atau dapat diartikan rangkain usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan merupakan serangkaian kegiatan yang terencana secara terus menerus sebagai upaya yang dilakukan secara sadar untuk memperbaiki kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dalam berbagai aspek, dengan jalan memaksimalkan sumber daya yang ada.

Pemerintah pusat memasukan pembangunan perumahan menjadi salah satu skala prioritas pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah pusat



maupun pemerintah daerah memiliki tanggungjawab dan kewenangan dalam merancang sebuah keputusan untuk mengatasi permasalahan mengenai perumahan yang ada dalam masyarakat khususnya masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan membuat sebuah kebijakan publik untuk mengatasi masalah tersebut.

Kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah biasanya berbentuk sebuah program, yang kemudian program tersebut dapat dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Seperti program beda rumah yang dibuat oleh pemerintah kota batu. Program bedah rumah adalah program yang diberikan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang tidak memiliki standar rumah untuk dihuni. Standar layak huni dilihat dari kecukupan luas, kualitas dan kesehatan. Program bedah rumah tidak berfokus pada fisik rumah saja tetapi memberikan penyadaran kepada masyarakat miskin pentingnya tempat tinggal yang layak huni. Selain itu pada saat pelaksanaan program bedah rumah, diharapkan akan muncul rasa gotong royong di masyarakat yang kini mulai pudar.

Alasan Kota Batu melaksanakan program ini untuk mensejajarkan taraf hidup dan rumah layak huni, menciptakan lingkungan bersih, sehat, rapi dan teratur dan memberdayakan peran serta masyarakat terhadap pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaanya mengacu pada Peraturan Walikota Batu Nomor 42 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemberian Dana Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni. Keberadaan program bedah rumah setidaknya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kota Batu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

, jumlah rumah tidak layak huni dan jumlah rumah layak huni yang sudah dibedah melalui program bedah rumah digambarkan pada tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1 Data Program Bedah Rumah di Kota Batu**

Tahun	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	Rumah Layak Huni Melalui Bedah Rumah (Unit)
2012	1494	107
2013	1387	55
2014	1332	292
2015	908	553

*Sumber : LKPJ Kota Batu Tahun, 2016*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, pada tahun 2012 sampai dengan 2015 program bedah rumah sudah terlaksana. Pada tahun 2016 program bedah rumah tidak terealisasi. Seperti yang ada pada berita *online* [www. malangvoice.com](http://www.malangvoice.com) yang diterbitkan pada 13 September 2016 dijelaskan bahwa Eddy Rumpoko, Walikota Batu mengaku kecewa dengan kinerja bawahanya karena program bedah rumah pada tahun 2016 tidak terealisasi. Hal ini karena pelaksanaanya telat, sudah tiga bulan jelang tutup tahun belum juga terealisasi. Namun pada tahun 2017 program bedah rumah mulai dilaksanakan kembali oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Pelaksanaan program bedah rumah pada tahun 2017 sebanyak 100 rumah yang tidak layak huni. Adapun rekapitulasi data terkait



penerima bantuan program bedah rumah yang ada di Kota Batu pada tahun 2017 sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Rekapitulasi Penerima Bantuan Program Bedah Rumah Tahun 2017**

1	Kecamatan Batu	Jumlah Rumah Di Bedah
		(Unit)
	Sisir	6
	Pesanggrahan	9
	Ngaglik	2
	Temas	8
	Songgokerto	9
2	Kecamatan Junrejo	
	Junrejo	2
	Tlekung	7
	Mojorejo	1
	Pendem	3
	Dadaprejo	1
	Torongrejo	1

3.	<b>Kecamatan Bumiaji</b>	
	Bulukerto	2
	Bumiaji	12
	Giripurno	21
	Pandanrejo	1
	Punten	3
	Gunungsari	1
	Sumberbrantas	11

*Sumber: Keputusan Walikota Batu Nomor 188.45/202/KEP/422.012/20, diolah*

Tabel 1.2 diatas menunjukan bahwa jumlah penerima bantuan program bedah rumah di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji paling banyak dari pada desa atau kelurahan lainnya yang ada di Kota Batu. Hal tersebut menjadi alasan penulis mengapa memilih Desa Giripurno Kota Batu sebagai tempat penelitian. Desa Giripurno terletak di Kecamatan Bumiaji dimana wilayah tersebut mempunyai wilayah yang paling luas diantara kecamatan lainnya. Luas wilayah menyebabkan pembangunan kurang merata dan keterbatasan ekonomi masyarakat menjadi faktor yang mengakibatkan keterbatasan daya beli rumah yang layak huni.

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa informan, implementasi program bedah rumah di Desa Giripurno masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh pemerintah. Masalahnya terdapat

dalam tahap implementasi dimana banyak ditemukan pelaksanaan program bedah rumah masih tidak sesuai dengan perencanaan awal. Seperti rumah warga yang menerima program bedah rumah dan memperoleh anggaran untuk merehab lantainya yang masih tanah, namun dalam pelaksanaanya tidak dilakukan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi program bedah rumah yang masih tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan di Desa Giripurno Kota Batu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian, peneliti harus menentukan tujuan yang ingin dicapai sebab tanpa adanya tujuan yang jelas maka seseorang peneliti akan mengalami kesulitan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi program bedah rumah yang masih tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan di Desa Giripurno Kota Batu.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

##### **1. Kontribusi Akademis**

###### **a. Bagi Mahasiswa**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperbanyak khazanah Ilmu Pengetahuan dalam dunia akademis khususnya Ilmu Administrasi Pemerintahan atau Publik. Selain itu mempertajam dan mengembangkan teori-teori yang ada dalam dunia akademis khususnya teori mengenai implementasi kebijakan publik.

###### **b. Bagi Peneliti**

Penelitian ini merupakan sarana untuk memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman di bidang penelitian terutama mengenai kebijakan publik dalam implelementasi kebijakan program bedah rumah dalam rangka pengentasan kemiskinan di Desa Giripurno Kota Batu.

##### **2. Kontribusi Praktis**

###### **a. Bagi Pemerintah**

Memberikan informasi atau masukan terhadap Pemerintah Kota Batu dalam melaksanakan program bedah rumah sehingga program tersebut dapat terimplementasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Serta menjadi alternatif untuk melakukan perbaikan atau evaluasi terhadap program tersebut.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan masukan bagi masyarakat dalam bersikap dan merespon kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu program bedah rumah agar program maupun kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat untuk masyarakat.

**E. Sistematika Pembahasan**

Pada penelitian ini perlu dijelaskan sistematika pembahasan agar para pembaca mampu dengan mudah dan benar memahami makna yang ada dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini akan membahas tentang latar belakang penelitian mengenai alasan yang mendasari peneliti untuk menganalisis implementasi kebijakan program bedah rumah dalam rangka pengentasan kemiskinan studi di Desa Giripurno Kota Batu. Selain itu pada bab ini juga berisi rumusan masalah yang diteliti, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan kerangka teoritis yang membahas landasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan judul atau tema yang diangkat.

### BAB III : METODE PENELITIAN

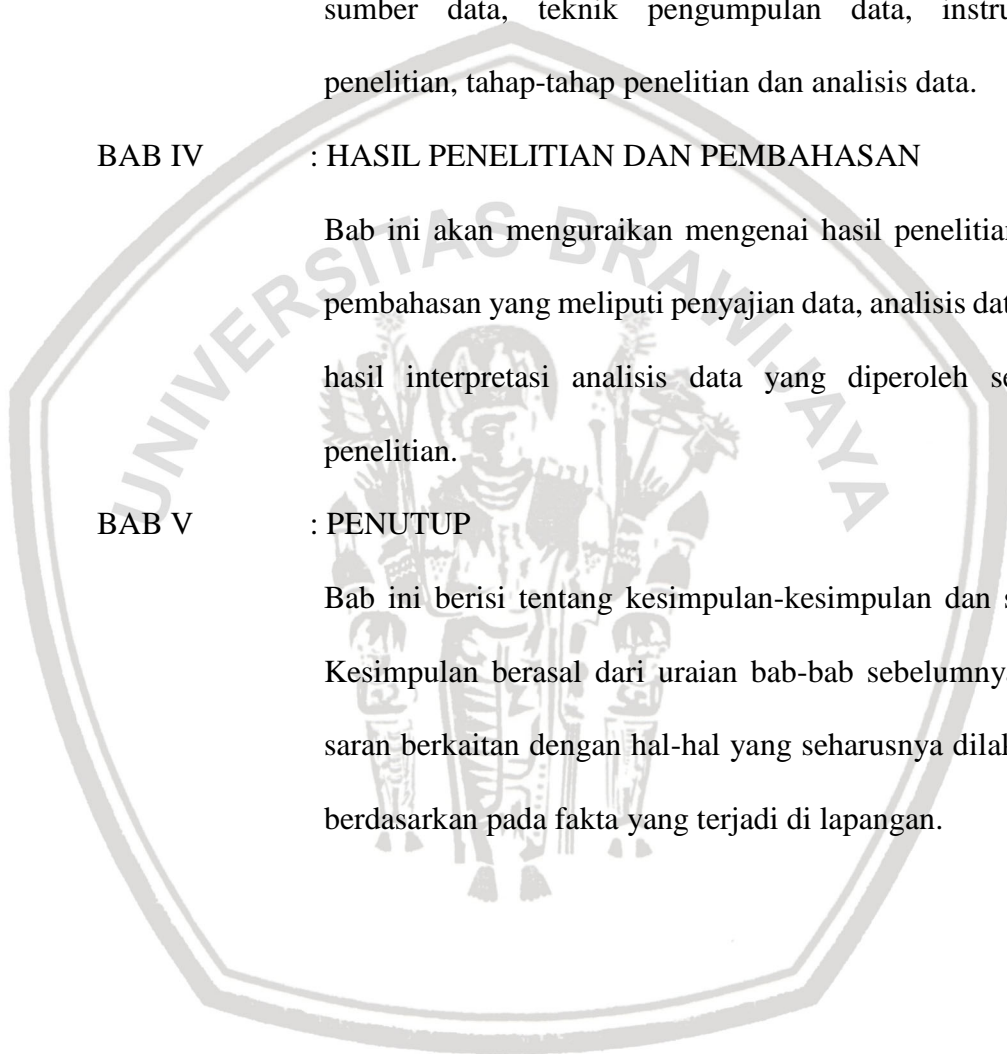
Bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yang meliputi: jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, tahap-tahap penelitian dan analisis data.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi penyajian data, analisis data dan hasil interpretasi analisis data yang diperoleh selama penelitian.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dan saran. Kesimpulan berasal dari uraian bab-bab sebelumnya dan saran berkaitan dengan hal-hal yang seharusnya dilakukan berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kebijakan Publik

##### 1. Pengertian Kebijakan Publik

Pengertian mengenai kebijakan publik memang sering mengalami perbedaan pandangan, hal tersebut dipengaruhi oleh ideologi, dan sejauh mana konteks permasalahan studi yang dilakukan. Perbedaan pandangan tersebut bukan untuk saling menjatuhkan, melainkan memiliki hubungan untuk saling melengkapi, di mana satu pendapat terkadang mampu menjelaskan satu permasalahan tetapi belum tentu bisa menjelaskan permasalahan yang lain. Disinilah fungsi dari pendapat lain.

Kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dye dalam Pasalong (2011:39) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Winarno (2014:20) dalam bukunya yang berjudul kebijakan publik mengkritisi pendapat tersebut dan menganggap bahwa kebijakan versi Dye ini memang memiliki batasan yang tepat, namun batasan ini tidak memberi batasan yang secara jelas apa yang harus diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Berbeda dengan Eyestone dalam Winarno (2014:20) mendefinisikan kebijakan publik secara luas dimana kebijakan publik adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep tersebut menawarkan konsep kebijakan publik secara luas namun tidak pasti karena apa yang mencakup kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.



Kebijakan publik adalah seperangkat keputusan yang saling terkait yang diambil oleh aktor politik atau kelompok aktor berkaitan dengan seleksi dari tujuan-tujuan dan alat untuk mencapai tujuan tersebut dalam situasi yang spesifik dimana keputusan-keputusan itu secara prinsip berada diantara kekuasaan aktor-aktor tersebut untuk dicapai (Jenkins dalam Safrony, 2012:121). Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Jenkins, kebijakan publik hanya dianggap sebagai suatu keputusan dan proses pengambilan keputusan semata. Berbeda dengan Jenkins, Anderson mendefinisikan kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Anderson, 1979:4). Sedangkan menurut Fredrich menjelaskan bahwa:

“Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu”. (Agustino, 2008:7)

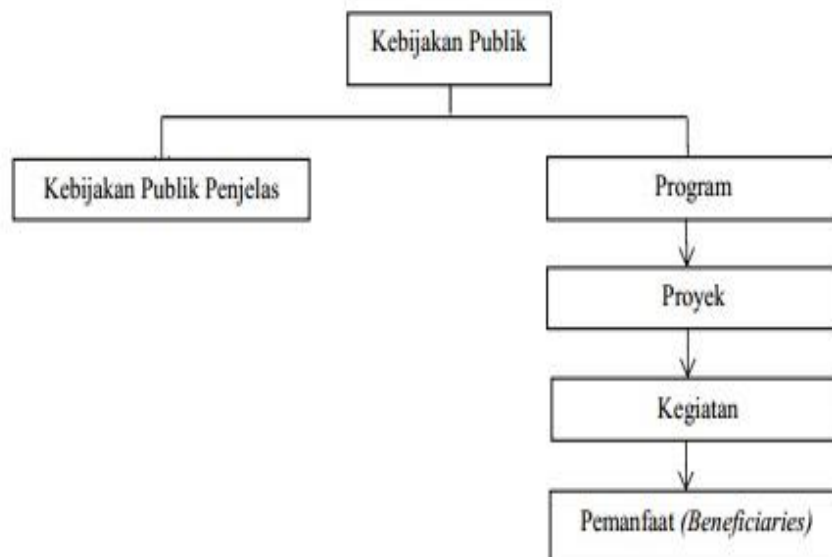
Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan oleh beberapa pakar terkait kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan instruksi yang dibuat oleh pembuat keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan publik fokus pada masalah publik (masyarakat) dan permasalahan lainnya. Keputusan-keputusan dalam kebijakan publik memiliki tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat.

## 2. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Meter dan Horn dalam Agustino (2008:139) memberikan pengertian implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Sedangkan Nugroho (2012:675) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikan kebijakan publik yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Sekuensi Implementasi Kebijakan**



(Sumber : Nugroho, 2012)

Proses implementasi kebijakan seperti pada gambar di atas menjelaskan bahwa kebijakan publik dioperasionalkan dalam bentuk program. Kemudian program tersebut diturunkan menjadi proyek yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan (Nugroho, 2012:680). Kegiatan tersebut ditunjukan kepada pemanfaat program, yang mana pemanfaat program tersebut adalah masyarakat. Pada akhirnya kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan oleh beberapa pakar terkait implementasi kebijakan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang nantinya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah biasanya berbentuk program. Program yang dibuat oleh pemerintah memiliki tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat. Tahapan implementasi kebijakan merupakan tindakan nyata dan konkrit yang dilakukan oleh pemerintah dari hasil rumusan yang telah dibuat dalam tahap formulasi. Fakta yang ada di lapangan, implementasi kebijakan bisa saja mempengaruhi para objek yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan.

### **3. Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Implementasi Kebijakan**

Setiap implementasi kebijakan publik mengandung faktor pendukung dijelaskan oleh Anderson dalam Islamy (2009:108-110) bahwa terdapat sebab-sebab anggota masyarakat melaksanakan suatu kebijakan, yaitu:

- a. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan badan-badan pemerintah
- b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan

- c. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan
- d. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan-kebijakan kontroversial yang lebih banyak mendapatkan penolakan warga masyarakat dalam implementasinya

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yakni: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin dicapai (Agustiono, 2008:139) pendapat tersebut tidak jauh berbeda seperti yang diungkapkan oleh Grindle dalam Agustino (2008:139) sebagai berikut;

“Keberhasilan impementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan apa yang telah ditentukan, yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”

Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Menurut Sabatier dalam Parson (2008:487) terdapat enam syarat yang mencukupi dan harus ada untuk implementasi yang efektif ,yaitu:

- a. Tujuan yang jelas dan konsisten, sehingga dapat menjadi standar evaluasi legal dan sumber daya.
- b. Teori kasual yang memadai, dan memastikan agar kebijakan itu mengandung teori yang akurat tentang bagaimana cara melahirkan perubahan.
- c. Struktur implementasi yang disusun secara legal untuk membantu pihak-pihak yang mengimplementasikan kebijakan dengan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.
- d. Para pelaksana implementasi yang ahli dan berkomitmen yang menggunakan kebijakan mereka untuk mencapai tujuan kebijakan.
- e. Dukungan dari kelompok kepentingan dan “penguasa” di legislatif dan eksekutif.

- f. Perubahan dalam kondisi sosio-ekonomis yang tidak melemahkan dukungan kelompok dan penguasa atau tidak meruntuhkan teori kausal yang mendasari kebijakan.

Selain faktor pendukung pelaksanaan kebijakan juga terdapat resiko kegagalan dalam implementasi kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Hogwood dan Gunn dalam Winarno (2012:102) yang membagi pengertian kegagalan kebijakan (policy failure) kedalam dua kategori, yaitu:

- a. *Non Implementation*, yang artinya bahwa suatu kebijaksanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana. Hal ini terjadi karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan yang terjadi.
- b. *Unsuccessful Implemntation*, yang artinya suatu kebijaksanaan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan kebijaksanaan tersebut, tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijaksanaan yang memiliki resiko untuk gagal tersebut disebabkan faktor-faktor pelaksanaannya yang jelek (*bad execution*), kebijaksanaan yang jelek (*bad policy*) dan kebijakan itu bernasib jelek (*bad luck*).

#### 4. Hubungan Kebijakan dengan Program

Kebijakan dan program dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau kegiatan yang disengaja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Banyak orang yang mendefinisikan program hampir sama dengan kebijakan. Sebagaimana yang dikutip dalam Arikunto (1998:1) yang merumuskan pengertian program sebagai sederajat kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Suatu program merupakan kegiatan yang direncanakan makan tentu saja perencanaan itu diarahkan untuk pencapaian tujuan. Dengan demikian maka



program itu keberhasilannya dapat diukur. Memang dapat dikatakan bahwa setiap orang yang membuat program kegiatan tentu ingin mengetahui sejauh mana program tersebut dapat terlaksana.

Selain itu ada yang mengatakan bahwa kebijakan dan program adalah suatu kegiatan yang memiliki hubungan. Kebijakan selalu berhubungan dengan dorongan dan peraturan, sedangkan program membutuhkan dorongan, aturan maupun implementasi. Hubungan antara ketiga hal tersebut adalah seringkali suatu kebijakan mencakup sejumlah program. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tjokroamidjojo (1990:195-196) bahwa program adalah aktivitas sosial yang terorganisasi dengan tujuan tertentu dalam ruang dan waktu yang terbatas, yang terdiri dari berbagai proyek dan biasanya terbatas pada suatu organisasi atau aktivitas.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan berhubungan dengan bagaimana untuk mencapai tujuan. Sehingga dapat diartikan sebagai suatu wujud aksi umum program untuk mencapai tujuan khusus. Sebelumnya tujuan telah ditetapkan secara spesifik dan kebijakan tersebut dicapai melalui program tertentu. Program dapat dijelaskan sebagai kebijakan dalam hal tujuan yang ingin di capai. Program merupakan sebuah langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

## B. Program

### 1. Pengertian Program

Definisi terkait program sudah banyak dibahas oleh para ahli. Banyak para ahli yang menyamakan program dengan rencana. Memang benar bahwa program mengandung pengertian rencana. Sebagaimana yang dikutip oleh Arikunto (1998:1) yang merumuskan pengertian program sebagai berikut:

“ Program adalah sederajat kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi kegiatan yang sudah dilaksanakan bukan lagi merupakan program. Suatu program merupakan kegiatan yang direncanakan maka tentu saja perencanaan itu diarahkan pada pencapaian tujuan. Dengan demikian maka program itu keberhasilannya dapat diukur. Memang dapat dikatakan bahwa setiap orang yang membuat program kegiatan tentu ingin mengetahui sejauh mana program tersebut dapat terlaksana. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan cara dan alat tertentu. Kegiatan yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan tersebut dikenal dengan evaluasi program”

Selain itu ada yang mengatakan bahwa kebijakan, program dan proyek adalah suatu kegiatan yang memiliki hubungan. Kebijakan selalu berhubungan dengan dorongan dan perintah. Program membutuhkan dorongan, aturan, maupun implementasi, sedangkan proyek hanya terfokus pada pelaksanaannya saja. Hubungan antara ketiga hal tersebut adalah seringkali suatu kebijakan mencakup sejumlah program, dan sebuah program terdiri dari sejumlah proyek. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tjokroamidjojo (1990:195-196) bahwa program adalah aktivitas sosial yang terorganisasi dengan tujuan tertentu dalam ruang dan waktu yang terbatas, yang terdiri dari berbagai proyek dan biasanya terbatas pada satu organisasi atau aktivitas.



Menurut Mansyur (2010:2-5) program dan proyek adalah sebuah konsep yang saling terkait satu sama lain dan berada dalam alur rasional yang nyaris sejajar namun memiliki cakupan yang tidak sama. Program adalah rangkaian dari proyek yang berhubungan dan berkelanjutan sampai waktu yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, sedangkan proyek adalah sebagian dari sebuah keseluruhan kegiatan yang menggunakan sumber-sumber untuk memperoleh suatu manfaat dengan harapan mendapatkan hasil pada masa yang akan datang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa program merupakan alat (instrumen) kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau masyarakat dikoordinasikan oleh instansi/lembaga masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa makna dari program sama dengan kebijakan, sangat sulit untuk membedakan antara program dan kebijakan. Program merupakan bagian dari kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memiliki tujuan untuk mengatasi masalah publik salah satunya adalah permasalahan kemiskinan. Maka dari itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membuat kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Kebijakan tersebut biasanya berbentuk program. Seperti program bedah rumah ada yang di Kota Batu merupakan sebuah program yang dibuat oleh pemerintah daerah Kota Batu dalam menyediakan rumah yang layak huni bagi

masyarakat miskin, sehingga dapat sedikit berkurang masalah kemiskinan dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Batu.

## 2. Macam-macam Program

Menurut Arikunto (1998:2) program mempunyai wujud yang bermacam-macam ditinjau dari enam aspek yakni tujuan, jenis, jangka waktu, luas sempitnya, pelaksana, sifatnya adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari segi tujuan, terdapat program yang kegiatannya bertujuan mencari keuntungan (kegiatan yang bersifat komersial) dan ada yang bertujuan sukarela (kegiatan sosial). Jika programnya bertujuan komersial, ukurannya adalah seberapa banyak program tersebut telah memberikan keuntungan. Tetapi jika programnya bertujuan sosial maka ukurannya adalah seberapa banyak program tersebut bermanfaat bagi orang lain.
- b. Ditinjau dari segi jenis, ada program pendidikan, program koperasi, program kemasyarakatan, program pertanian dan sebagainya yang pengklasifikasiannya didasarkan atas isi kegiatan program tersebut. Jenis program cenderung kurang memberikan variasi atas penilainya. Cara, model, metode penilaian untuk berbagai jenis program cenderung mempunyai kesamaan.
- c. Ditinjau dari segi jangka waktu, ada program berjangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Untuk ukuran jangka waktu bagi sesuatu program sebenarnya agak relatif. Program jangka pendek adalah program

yang berjangka satu tahun atau kurang. Sedangkan program jangka menengah adalah program kegiatan antara satu sampai lima tahun, sedangkan program jangka panjang memiliki jangka waktu lebih dari lima tahun.

- d. Ditinjau dari segi keelaluasaanya, ada program sempit yang menyangkur variabel terbatas dan program luas yang menyangkut banyak variabel.
- e. Ditinjau dari segi pelaksana, maka ada program kecil yang hanya dilaksanakan oleh beberapa orang, dan program besar yang dilaksanakan oleh puluhan sampai ratusan orang.
- f. Ditinjau dari segi sifatnya, terdapat program penting dan program yang kurang penting. Program penting adaah program yang dampaknya menyangkut nasib banyak orang mengenai hal yang vital, sedangkan program yang kurang penting adalah sebaliknya.

### 3. Implementasi Program

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian implementasi adalah sama dengan pelaksanaan (Badudu:1996). Selanjutnya menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2015:49) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan atau digariskan dalam suatu kebijakan.

Menurut Jones (1996:296) terdapat tiga pilar penilaian dari implementasi program yaitu:

a. Organisasi

Organisasi berkenaan dengan struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja yang jelas.

b. Interpretasi

Interpretasi berkenaan dengan orang-orang yang ada di dalam organisasi yang bertanggung jawab dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku

c. Penerapan

Penerapan berkenaan dengan peraturan atau kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat ini harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan.

Berdasarkan pernyataan Jones bahwa kinerja program tidak dapat tercapai sesuai dengan apa yang dicita-citakan apabila tidak termasuk dalam tiga unsur yakni pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan. Secara tidak langsung maksud dari pernyataan Jones bahwa keberhasilan suatu program atau kebijakan bisa dinilai dari ketiga unsur tersebut. Apabila organisasi tidak dapat melaksanakan program dengan optimal, maka organisasi tersebut tidak dapat memberikan output program yang sesuai. Karena itu, tiga unsur tersebut di dalam implementasi program sangat

penting dalam menunjang proses program agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat terhadap suatu sasaran yang akan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui adanya pengorganisasia, interpretasi dan penerapan.

### **C. Kemiskinan**

#### **1. Pengertian Kemiskinan**

Pengertian kemiskinan dapat diartikan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho,1995).

Supriatna (1997) menjelaskan pengertian kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesehatan, dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukan lingkaran ketidakberdayaan.



Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.

Sedangkan kemiskinan menurut Mukherje dan Carreire (2002) adalah suatu keadaan dimana seseorang mengalami berbagai ancaman untuk boleh hidup layak. Hal ini termasuk tidak cukupnya penggunaan, kelemahan, pendidikan yang rendah, tidak memadainya pengkhitmatan kesehatan asas, kemudahan asas yang boleh menyediakan keperluan sehari-hari minimum dan kurangnya peluang untuk mengambil bagian dalam kehidupan sosial dan politik sebagai sesama.

Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan pangan, namun tercukupi kebutuhan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun permukiman yang layak. Hal tersebut merupakan salah satu standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan kerja untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).

Menurut Bank Dunia dalam Tantoro (2014) telah membagi kemiskinan menjadi tiga dimensi, yaitu sebagai berikut:

- a. Kemiskinan multidimensional, karena keperluan manusia yang bermacam-macam, maka kemiskinan memiliki banyak aspek. Dilihat dari dasar awam kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset-aset, organisasi sosial politik dan pengetahuan serta keterampilan. Aspek sekunder yang berupa miskin jaringan sosial sumber-sumber kewenangan dan maklumat. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut memanifestasikan dirinya dalam bentuk kekurangan gizi, air, dan perumahan yang tidak sehat



- dan perawatan kesehatan yang kurang baik serta pendidikan yang juga kurang baik.
- b. Aspek-aspek kemiskinan tadi saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti, bahwa kemajuan atau kemunduran salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan dan kemunduran pada aspek yang lainya.
  - c. Bahwa yang miskin adalah manusianya, baik secara individu maupun kolektif. Kita sering mendengarkan perkataan kemiskinan pedesaan (rural poverty), kemiskinan perkotaan (urban poverty) dan sebagainya. Ini bukan berarti desa atau kota mengalami kemiskinan, tetapi orang-orang atau penduduk atau juga manusianya yang menderita miskin. Jadi yang miskin adalah orang-orangnya, penduduk atau manusianya.

Sementara itu Maipita (2014) menyebutkan lima istilah kategoritatif mengenai kemiskinan, yaitu:

- a. Kemiskinan struktural atau kemiskinan buatan. Kemiskinan ini disebabkan oleh tatanan kelembagaan dan sistem yang diterapkan, seperti sistem politik, ekonomi, keamanan dan lainnya.
- b. Kemiskinan alamiah. Kemiskinan ini disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam.
- c. Kemiskinan kultural. Kemiskinan ini disebabkan oleh budaya penduduk yang malas, tidak mau bekerja keras, tidak disiplin dan sebagainya.
- d. Kemiskinan absolut. Kemiskinan yang dipandang dari sisi kemampuan memenuhi kebutuhan dasar minimumnya.
- e. Kemiskinan relatif. Kemiskinan ini biasanya diperoleh dengan membandingkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dengan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan pengertian kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau sekelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar tersebut meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman kekerasan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan, dan lain-lain.

## 2. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Suyanto (2013) mengatakan bahwa faktor penyebab kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya, selain itu juga bisa terjadi karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Sedangkan kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada dan membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak dapat menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata.

Tidak sedikit penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kemiskinan. Pada konsep yang dikemukakan oleh Chambers dalam Nugroho (1995) menjelaskan bagaimana kondisi yang disebut miskin di sebagian besar negara-negara berkembang dan dunia ketiga adalah kondisi yang disebut memiskinkan. Kondisi yang sebagian besar ditemukan bahwa kemiskinan selalu diukur atau diketahui berdasarkan rendahnya kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok berupa pangan, kesehatan, perumahan atau permukiman, dan pendidikan. Rendahnya kemampuan pendapatan diartikan pula sebagai rendahnya daya beli atau kemampuan untuk mengkonsumsi.

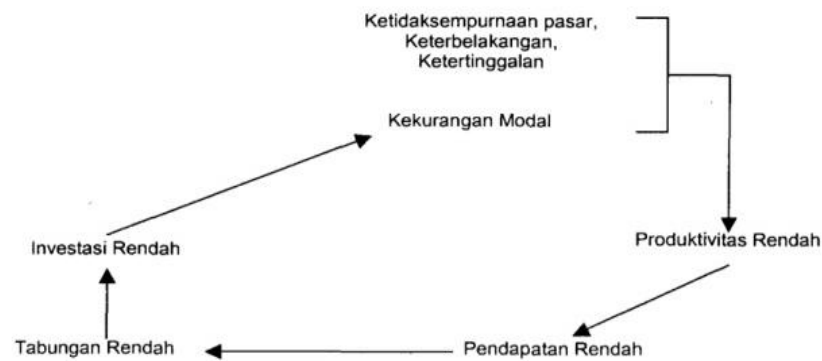
Kemampuan pendapatan yang relatif terbatas atau rendah menyebabkan daya beli seseorang atau sekelompok orang terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok menjadi rendah (Nugroho, 1995). Konsumsi ini terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan gizi dan kesehatan standar. Akibatnya, kemampuan untuk mencapai standar kesejahteraan menjadi rendah seperti:

- a. Ketersediaan pangan tidak sesuai atau tidak mencukupi standar gizi yang disyaratkan sehingga beresiko mengalami mal gizi atau kondisi gizi rendah yang selanjutnya sangat rentan terhadap resiko penyakit menular.
- b. Kesehatan relatif kurang terjamin sehingga rentan terhadap serangan penyakit dan kemampuan untuk menutupi penyakit juga relatif terbatas sehingga rentan terhadap resiko kematian.
- c. Perumahan atau permukiman yang kurang atau tidak layak huni sebagai akibat keterbatasan pendapatan untuk memiliki atau mendapatkan lahan untuk tempat tinggal atau mendapatkan tempat tinggal yang layak huni. Kondisi ini akan berdampak pada kesehatan.
- d. Taraf pendidikan yang rendah. Kondisi ini disebabkan karena keterbatasan pendapatan untuk mendapatkan pendidikan yang diinginkan atau sesuai dengan standar pendidikan.

Sharp dalam Kuncoro (1997) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi yaitu :

- a. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan.
- c. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) menurut Nurkse dalam Kuncoro (1997) karena adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Seperti yang ada pada gambar 2.5 berikut:



**Gambar 2.2**  
**Lingkaran Setan Kemiskinan**  
(Sumber: Kuncoro, 1997:132)

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kemiskinan terdapat dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi namun tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam mengelola sumber daya yang dimiliki karena keterampilan tidak memadai, tingkat pendidikan yang rendah, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan bencana alam, krisis ekonomi, serta tidak adanya pemihakan kebijakan yang memberikan kesempatan dan peluang bagi masyarakat miskin.

### 3. Indikator Kemiskinan

Menurut Suyanto (2013) kelompok penduduk yang tergolong miskin adalah sebagai berikut:

- Hidup dibawah garis kemiskinan. Pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal atau keterampilan.

- b. Pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuratan sendiri. Mereka pun tidak memiliki syarat untuk terpenuhi kredit perbankan.
- c. Tingkat pendidikan golongan miskin umumnya rendah, tidak sampai tamat Sekolah Dasar. Waktu mereka umumnya habis mencari nafkah sehingga tidak ada lagi waktu untuk belajar.
- d. Banyak diantara mereka tinggal di pedesaan dan tidak mempunyai tanah garapan, atau walaupun ada relatif kecil sekali. Pada umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar diluar pertanian.
- e. Banyak yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau *skill* dan pendidikan. Bahkan perkembangan teknologi di kota-kota negara berkembang justru menampik penyerapan tenaga kerja, sehingga penduduk miskin yang pindah ke kota terdampar dalam kantong-kantong kemelaratan (*slumps*).

Hasan yang dikutip oleh Sumodiningrat (1997) menjelaskan bahwa kelompok penduduk miskin mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Sebagian besar penduduk miskin tidak mempunyai penghasilan yang tetap.
- b. Pada umumnya penduduk miskin tidak bekerja secara penuh (fulltime)
- c. Penduduk miskin kebanyakan tidak mempunyai peralatan produksi, peralatan kerja yang memadai.
- d. Sebagian besar penduduk miskin berpendidikan rendah.

Pemahaman terhadap indikator kemiskinan dimaksudkan agar dapat mengetahui strategi program yang relevan untuk upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disederhanakan bahwa indikator seseorang/kelompok/rumah tangga/ penduduk yang tergolong miskin adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sadang, pangan, papan, kesehatan.
- b. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal dan keterampilan.
- c. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah.



## D. Rumah

### 1. Definisi Rumah dan Perumahan

Penyelenggaraan perumahan atau rumah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Adapun definisi dari rumah berdasarkan Rencana Strategis yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2015:3) adalah sebagai berikut:

- a. Tempat untuk berumah tangga, tempat tinggal atau alamat, lokasi tempat tinggal
- b. Bagian dari eksistensi individu atau keluarga (terkait dengan status, tempat kedudukan, identitas)
- c. Bagian dari kawasan fungsional kota
- d. Investasi (keluarga atau perusahaan)
- e. Sumber bangkitan pergerakan (*trip production*)
- f. Ruang untuk rekreasi
- g. Ruang yang digunakan untuk menjalin kehidupan keluarga
- h. Wadah sebagai batas privasi
- i. Dst

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman pada bab I pasal 1 ayat 7 menjelaskan definisi



rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Pengertian perumahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Secara fisik perumahan merupakan sebuah lingkungan yang terdiri dari kumpulan unit-unit rumah tinggal dimana dimungkinkan terjadinya interaksi sosial diantara penghuninya, serta dilengkapi prasarana sosial, ekonomi, budaya, dan pelayanan yang merupakan subsistem dari kota secara keseluruhan. Lingkungan ini biasanya mempunyai aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan serta sistem nilai yang berlaku bagi warganya.

Menurut M Sastra (2006:29) perumahan diartikan sebagai kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, seperti misalnya penyediaan air minum, tempat pembuangan sampah, tersediannya jaringan listrik, telepon, jalan, yang memungkinkan lingkungan perumahan berfungsi sebagaimana mestinya. Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan hal yang sangat diprioritaskan oleh pemerintah, sebab dengan pembangunan ini diharapkan kebutuhan akan rumah yang merupakan kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi dan pada akhirnya dapat meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan definisi dari rumah atau perumahan lebih digambarkan sebagai sesuatu yang bersifat fisik (*house, dwelling, shelter*) atau bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti gedung dan sebagainya). Perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat.

## 2. Fungsi Rumah

Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga rumah. Rumah tidak hanya dilihat sebagai sarana kebutuhan hidup, tetapi rumah juga merupakan tempat bermukimnya manusia dalam menciptakan tatanan hidup untuk bermasyarakat (Trikomara, Sebayang, Putri, 2007:2) Penyediaan perumahan yang layak akan mampu meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Sebagai salah satu kebutuhan dasar (*basic need*) selain sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan, rumah memiliki arti sangat penting. Rumah paling tidak diusahakan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai tempat perlindungan dari panas dan hujan serta tempat dipandang sebagai bangunan fisik semata, akibatnya penyediaan perumahan hanya untuk mencapai target kuantitas semata tanpa memperhatikan kualitas dan mutu perumahan tersebut (Nurasrizal, 2010:29).

Maslow dalam Nurasrizal (2010:29) membagi tingkat kebutuhan manusia terhadap hunian sebagai berikut:

a. *Survival Needs*

Tingkat kebutuhan yang paling dasar dimana hunian merupakan sarana untuk menunjang keselamatan hidup manusia.

b. *Safety and Security Need*

Hunian merupakan sarana perlindungan untuk keselamatan anggota badan dan hak milik.

c. *Affiliation needs*

Hunian disini berperan sebagai identitas seorang untuk diakui dalam golongan masyarakat.

d. *Esteem needs*

Hunian merupakan sarana untuk mendapatkan pengakuan atas jati dirinya dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Rumah tidak lagi sebagai kebutuhan primer tetapi sudah menjadi kebutuhan lux.

e. *Cognitive and Aesthetic Needs*

Hunian tidak saja sebagai saran peningkatan kebanggan dan harga diri, tetapi juga dapat dinikmati keindahannya.

Kelayakan suatu hunian menurut UN *Universal Declaration of Human Rights* dalam Nurasrizal (2010:30) adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Dasar dan Infrastruktur.

Artinya sebuah tempat tinggal harus memiliki fasilitas yang memberikan kesehatan, keamanan, kenyamanan dan fasilitas seperti air minum, bahan bakar untuk memasak, memanaskan, penerangan, fasilitas sanitasi, tempat pembuangan sampah, tempat penyimpanan dan pelayanan untuk kondisi darurat.

- b. Keterjangkauan.  
Artinya biaya yang dibutuhkan untuk tempat tinggal yang layak huni harus terjangkau agar tidak mengurangi kemampuan sebuah rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya.
- c. Dapat ditinggali.  
Artinya sebuah tempat tinggal harus mampu melindungi penghuninya dari udara dingin, panas, hujan atau ancaman terhadap kesehatan, keamanan, dan lain-lainnya, serta ruang yang bekecukupan bagi penghun rumah tersebut.
- d. Aksesibilitas  
Artinya setiap orang berhak untuk memiliki perumahan yang layak dan kelompok marjinal juga harus memiliki akses terhadap tempat tinggal yang memprioritaskan hak mereka dalam pengalokasian lahan ataupun perencanaan guna lahan.
- e. Lokasi  
Artinya sebuah rumah tinggal harus terdapat di lokasi yang memiliki akses terhadap berbagai pilihan tempat kerja, pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat penitipan anak dan fasilitas sosial lainnya. Hal ini berlaku di kota dan desa. Sebuah rumah tinggal tidak boleh dibangun dekat daerah yang terpolusi ataupun sumber polusi.
- f. Mencerminkan budaya  
Artinya dalam membangun area perumahan, harus dipastikan bahwa nilai-nilai budaya yang dimiliki penghuninya tercermin di dalamnya, tidak meninggalkan atau melupakan budaya yang ada namun tetap menggunakan fasilitas-fasilitas modern.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi rumah selain sebagai tempat tinggal, rumah memiliki fungsi lainnya seperti sarana pembina keluarga, aset bagi pemiliknya serta cerminan harkat dan martabat penghuninya. Agar fungsi rumah dapat tercapai, maka setiap orang harus menempati atau memiliki rumah yang layak huni. Rumah yang layak huni bisa dilihat dari kecukupan luas, kualitas dan kesehatan.

### E. Deskripsi Program Bedah Rumah

Program bedah rumah adalah program kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau fakir miskin untuk mewujudkan rumah yang layak huni. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, tetapi terkait bagaimana membangun kapasitas kelompok fakir miskin untuk memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dari aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Hal ini dilakukan agar tercapainya kesejahteraan keluarga dan berdampak pada peningkatan dalam aspek sosial dan kesehatan.

Saat ini kegiatan program bedah rumah mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemberian Dana Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni. Adapun kriteria rumah tidak layak huni yang dibantu melalui program bedah rumah berdasarkan peraturan tersebut adalah:

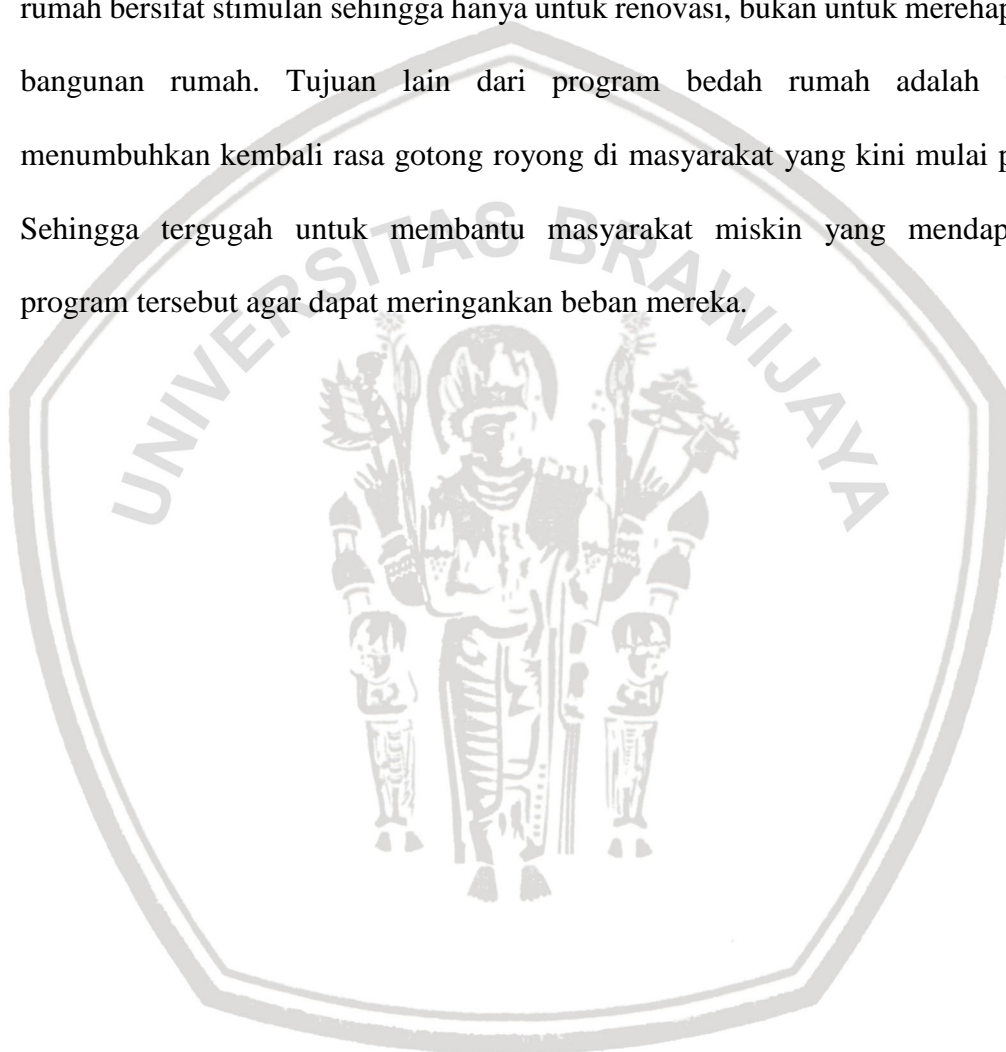
- a. Tanah milik sendiri.
- b. Dinding rumah umumnya terbuat dari bamboo/papan/bahan yang mudah rusak.
- c. Lantai tanah/ubin/plester kasar.
- d. Diutamakan tidak memiliki fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK).
- e. Diutamakan atap yang terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk.
- f. Lokasi rumah tidak berada atau diatas sepadan jalan dan sungai.

Sedangkan persyaratan untuk rumah yang ingin dibedah adalah:

- a. Surat permohonan.
- b. Fotocopy KTP.
- c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
- d. Surat Keterangan tidak mampu (asli).
- e. Surat Keputusan Kepanitian bedah rumah.
- f. Rincian Anggaran Belanja (RAB).
- g. Foto fisik rumah yang dibedah.
- h. Bukti kepemilikan tanah atau keterangan dari desa/kelurahan.
- i. Berpenduduk Kota Batu paling sedikit 2 (dua) tahun.



Program bedah rumah berbentuk dana stimulan yang anggaranya berasal dari APBD Kota Batu. Selain itu bisa diperoleh dari dana gotong royong. Program ini memberikan bantuan berupa dana yang diberikan kepada masyarakat yang rumah kepada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Bantuan program bedah rumah bersifat stimulan sehingga hanya untuk renovasi, bukan untuk merehap total bangunan rumah. Tujuan lain dari program bedah rumah adalah untuk menumbuhkan kembali rasa gotong royong di masyarakat yang kini mulai pudar. Sehingga tergugah untuk membantu masyarakat miskin yang mendapatkan program tersebut agar dapat meringankan beban mereka.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi, adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat (Tan dalam Silalahi, 2009:28). Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif ini peneliti berusaha memperoleh gambaran secara terperinci tentang implementasi kebijakan program bedah rumah yang ada di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Selanjutnya jenis penelitian deskriptif ini juga dirasa lebih memudahkan peneliti dalam menyampaikan data dan fakta-fakta mengenai permasalahan program bedah rumah yang masih tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya. Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2006:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Peneliti memakai pendekatan kualitatif karena peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan, untuk melihat situasi dan kondisi yang terkait dengan implementasi kebijakan program bedah rumah di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

Penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif biasanya memiliki tujuan untuk menggambarkan berbagai kondisi, berbagai situasi, fenomena sosial yang ada di masyarakat dan berupaya menarik realitas tersebut ke permukaan (Bungin, 2010:68). Secara garis besar, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dikarenakan, penelitian bertujuan untuk menggambarkan, meringkas, fenomena atau realitas tentang permasalahan implementasi kebijakan program bedah rumah yang masih tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya yang ada di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Realitas tersebut yang coba peneliti angkat ke permukaan dan dikolaborasikan dengan aspek kebijakan publik. Perspektif Charles O'Jones digunakan untuk menjelaskan model, gambaran kondisi, situasi dan ciri dari realitas implementasi kebijakan program bedah rumah yang ada di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian kualitatif bergerak berdasarkan fenomena atau permasalahan yang ada, sehingga lingkungnya masih sangat luas. Salah satu upaya yang bisa dilakukan

dengan menetapkan fokus penelitian, yang bertujuan untuk membatasi permasalahan yang ada. Menurut Moleong, ada dua maksud tertentu yang ingin dicapai dari penentuan fokus penelitian, yakni pertama untuk membatasi permasalahan melalui pembatasan bidang inkuiri, dan yang kedua adalah untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi (Moleong, 2000:62). Maksud dari tujuan fokus pertama adalah membatasi lokasi penelitian lainnya. Sedangkan maksud dari fokus yang kedua adalah untuk membatasi data dan informasi yang masuk, karena dalam kondisi penelitian lapangan peneliti kualitatif akan dihadapkan pada banyak data yang bersumber dari observasi, wawancara dan sebagainya. Secara garis besar penentuan fokus akan mempermudah peneliti dalam hal memilih data yang relevan dan data yang tidak relevan. Data yang relevan akan dimasukan dan dianalisis, sedangkan data yang tidak relevan akan dikeluarkan (Moleong, 2000:79). Dengan dasar pemahaman tersebut dan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka fokus penelitian di dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi program bedah rumah yang masih tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan di Desa Giripurno Kota Batu dengan menggunakan teori implementasi program dari Charles O'Jones:
  - a) Organisasi
  - b) Interpretasi
  - c) Penerapan

### C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat diadakanya suatu penelitian, atau dapat dijelaskan bahwa lokasi adalah seluruh wilayah atau daerah tempat fenomena atau peristiwa yang dapat diungkap. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti memilih lokasi di Kota Batu. Hal tersebut atas pertimbangan bahwa Kota Batu telah melaksanakan program bedah rumah, terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pelaksanaan program bedah rumah yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu. Selain itu administratif wilayah Kota Batu yang sangat luas dengan tiga kecamatan yang menyebabkan pembangunan kurang merata, didukung dengan keadaan geografis yang masih didominasi lahan pertanian dan perkebunan serta infrastruktur yang kurang memadai khususnya di wilayah pedesaan yang mengakibatkan masyarakat memiliki keterbatasan daya beli rumah layak huni karena rata-rata memiliki tingkat perekonomian rendah.

Situs penelitian adalah tempat dimana peneliti akan menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti guna memperoleh data yang valid, akurat, dan benar-benar dibutuhkan. Adapun situs penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kantor Desa Giripurno, Panitia program bedah rumah yang ada di Desa Giripurno, dan Penerima bantuan program bedah rumah. Pemilihan situs di Desa Giripurno karena desa ini mendapat banyak bantuan program bedah rumah sebesar 21 unit rumah.

#### D. Sumber Data

Peneliti kualitatif meletakkan data sebagai suatu yang penting. Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2012:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah berbentuk kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan yang meliputi dokumen, foto dan sebagainya. Data dapat dikumpulkan dari latar data (*data setting*) dimana fenomena atau peristiwa secara normal terjadi tetapi tetap dibatasi pada konteks permasalahan. Data-data relevan yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara (*interview*) dan obsearsi dengan informan yang dianggap benar-benar mengetahui tentang implementasi program bedah rumah yang ada di Desa Giripurno Kota Batu. Sumber data dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu sumber data primer (*primary data*) dan sumber data sekunder (*secondary data*) (Silalahi, 2009:289)

##### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah suatu objek atau dokumen original atau dapat dikatakan material mentah dari pelaku yang disebut "*first-hand information*". Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung tanpa melalui perantara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ir. Mohammad Dakkir, MM sebagai Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu dan Bapak Mochamad Naseh



Lukman, ST.MM sebagai Kepala Seksi Perumahan, Pertimbangannya karena Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Organisasi Perangkat Daerah sebagai Tim Verifikasi yang memiliki tugas melakukan survey di lapangan, memberikan rekomendasi rumah yang ingin di bedah, menentukan besaran dana serta membuat rancangan anggaran untuk rumah yang sudah lolos verifikasi.

- b. Kantor Desa Giripurno yang diwakili oleh Bapak Supeno sebagai Kasi Kesra Desa Giripurno yang merupakan salah satu desa mendapatkan paling banyak penerima program bedah rumah sebanyak 21 unit rumah.
- c. Panitia program bedah rumah di Desa Giripurno Bapak Tabrani dan Bapak Supriyadi
- d. Penerima program bedah rumah di Desa Giripurno Ibu Siani dan Ibu Trikuri.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan (Silalahi, 2009:291). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa data sekunder ini adalah data yang sudah tersedia ketika peneliti melakukan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

- a. Peraturan Walikota Batu Nomor 42 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemberian Dana Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni.
- b. Kota Batu dalam Angka 2017.



- c. Profil Desa Giripurno Kota Batu.
- d. Persyaratan pengajuan program bedah rumah.
- e. Proposal pengajuan program bedah rumah di Desa Giripurno Kota Batu
- f. Laporan penerima bantuan program bedah rumah di Kota Batu tahun 2017
- g. Dokumen berisi tentang program bedah rumah.
- h. Laporan pertanggungjawaban penerima program bedah rumah di Desa Giripurno Kota Batu.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2014:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Ada beberapa macam teknik pengumpulan data, yaitu:

##### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tatap muka langsung dan melakukan tanya jawab terhadap permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian guna mendapatkan informasi atau data yang diperlukan. Menurut Esterberg (2002) yang dikutip oleh Sugiyono (2014:233) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara

yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan (Moelong, 2014:190).

## 2. Obsevarsi

Teknik obsevarsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah obsevarsi terus terang. Obsevarsi terus terang menurut Sugiyono (2012:228) adalah pengumpulan data dimana peneliti berterus terang kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen atau catatan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam rangka menyelesaikan permasalahan penelitian. Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti itu sendiri, dalam penelitian kualitatif peran peneliti sendiri sangat penting, dimana peneliti bertindak sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data dan pada akhirnya menjadi pelaporan hasil penelitiannya (Moleong, 2000:121). Disamping itu, ketika peneliti sendiri yang

menjadi instrumen, peneliti dapat secara mudah memutuskan sesuatu melalui penilaian keadaan yang ada di lapangan.

2. Pedoman wawancara (*interview guide*), dalam melakukan teknik wawancara peneliti tidak bisa terlepas dari pedoman yang telah dibuatnya. Hal ini bertujuan agar wawancara bisa dilakukan secara mendalam dan tidak melebar dari fokus yang diteliti, oleh karena itu pedoman wawancara sangat diperlukan. Pedoman wawancara dibuat oleh peneliti dengan cara mendalami fokus permasalahan yang diteliti dan mendalami teori yang digunakan.
3. Perangkat penunjang lapangan, yang terdiri dari kamera *hand phone*, catatan lapangan (*field note*), perekam suara. Instrumen-instrumen ini yang membantu peneliti dalam melakukan metode dokumentasi, sehingga apa yang terjadi selama di lapangan dapat terdokumentasi dengan baik. Instrumen ini juga membantu peneliti dalam pengarsipan data yang didapatkan selama di lapangan, sehingga memudahkan peneliti saat melakukan proses analisis data.

## G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Moleong (2014:127) menyebutkan bahwa terdapat tiga tahapan penelitian secara umum antara lain adalah tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.

### 1. Tahap pra lapangan

Pada tahap ini terdapat enam tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan. Kegiatan tersebut adalah menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, persoalan etika penelitian (Moloeng, 2014:127)

### 2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap ini adalah penelitian yang mulai dilaksanakan dilapangan. Ini adalah tahapan penelitian yang nyata dan sesungguhnya. Moleong (2014:137) menyebutkan bahwa uraian tentang tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian yakni memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.

### 3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data dilaksanakan apabila sesudah dari lapangan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan disini antara lain adalah menganalisis dan mengolah

data yang diperoleh dari lapangan, berkonsultasi dengan pembimbing atas hasil yang sudah didapatkan di lapangan, penyelesain laporan penelitian, melakukan revisi dan mempersiapkan segala keperluan dan persyaratan untuk ujian akhir.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tahap-tahap penelitian ini bersifat berjenjang yakni mulai tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap pasca lapangan. Namun, tahap-tahap penelitian tersebut tidak bersifat memaksa dan mengikat, melainkan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

#### **H. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses menemukan data-data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Unit analisis dari penelitian kualitatif adalah kata-kata atau gambar. Hal tersebut merupakan terjemahan dari “*Qualitative research tends to be associated with words or images as the unit analysis* (Denscombe, 2007:287-288)”. Prinsip pada analisis data kualitatif menurut Denscombe (2007:287-288), tergantung pada beberapa hal berikut:

1. Analisis data dan penggambaran kesimpulan harus disebutkan dengan kuat pada sumber data.
2. Pemaparan dari peneliti harus muncul dari kepedulian dan ketelitian dari pembaca data.
3. Peneliti harus menghindari persepsi yang tidak beralasan dalam analisis data.
4. Analisis dari data harus melibatkan sebuah proses yang berulang-ulang.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan program bedah rumah pada Desa Giripurno Kota Batu akan dianalisis menggunakan lima tahapan. Tahapan



tersebut antara lain: (1) Penyiapan data; (2) Pemahaman data; (3) Penginterpretasian data (mengembangkan kode-kode, kategori-kategori dan konsep-konsep); (4) Verifikasi data; dan (5) Penyajian data (Denscombe, 2007:288).

1. Penyiapan data, merupakan serangkaian proses untuk mempersiapkan data dengan jelas. Pada tahap ini peneliti akan mulai menyajikan keseluruhan data yang diperoleh berdasarkan wawancara kepada informan, observasi di lapangan serta dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan implementasi kebijakan program bedah rumah dalam rangka pengentasan kemiskinan pada Desa Giripurno Kota Batu. Setelah terkumpul data akan dipilah-pilah berdasarkan fokus dalam penelitian.
2. Pemahaman data dimaknai sebagai upaya untuk mengkonfirmasi ulang mengenai kebenaran data, mencocokkan antara data primer dan data sekunder. Peneliti juga akan membaca data-data yang telah didapatkan sehingga memperoleh sebuah pemahaman mengenai data-data yang nantinya akan dianalisis.
3. Interpretasi data merupakan sebuah langkah untuk mengembangkan kode, kategori dan konsep. Peneliti akan memulai mempersiapkan data dan kemudian memahami data. Proses pengkodean, kategorisasi, identifikasi dan pengembangan konsep sesuai dengan fokus penelitian.
4. Verifikasi data dilakukan dengan melihat derajat kepercayaan, derajat ketergantungan dan derajat kepastian. Peneliti akan melakukan proses

triangulasi data untuk melakukan verifikasi data sehingga data-data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang valid.

5. Penyajian data merupakan proses untuk menarasikan data-data yang sudah valid. Bagian ini adalah bagian yang paling penting karena mengandung jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian. Penyajian data akan diklasifikasikan berdasarkan fokus-fokus tertentu.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kota Batu

###### a. Kondisi Geografis dan Demografis Kota Batu

Kota Batu secara astronomis terletak pada posisi  $7^{\circ}44'$  -  $8^{\circ}26'$  Lintang Selatan dan  $122^{\circ}17'$ - $122^{\circ}57'$  Bujur Timur dengan Luas wilayah secara keseluruhan sekitar 199,09 Km<sup>2</sup> . Adapun batas-batas wilayah Kota Batu adalah sebagai berikut:

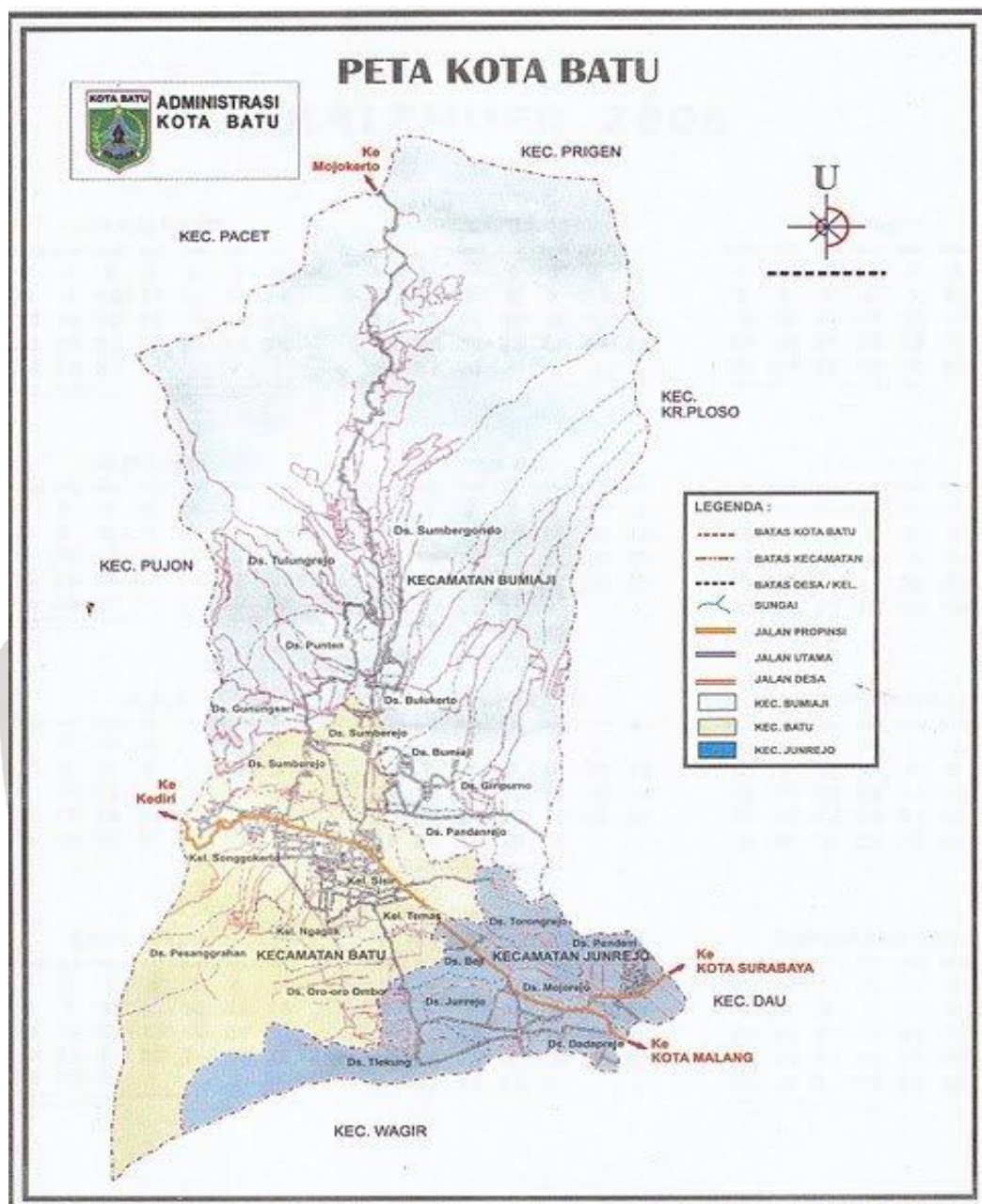
Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan

Sebelah Timur : Kabupaten Malang

Sebelah Selatan : Kabupaten Blitar dan Malang

Sebelah Barat : Kabupaten Malang.

Kota Batu mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2016, hujan hampir terjadi di setiap bulan. Rata-rata curah hujan pada tahun 2016 tercatat pada pengamatan yang dilakukan oleh Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Karangploso mencapai rata-rata 189 mm/bulan dengan jumlah hari hujan sebanyak 129 hari. Rata-rata kelembapan udara tertinggi terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 95 persen.



**Gambar 4.1 Peta Kota Batu**

*Sumber : id.wikipedia.org/, 2018*

Secara geografis, wilayah Kota Batu memiliki dua karakteristik yang berbeda, yaitu sebelah dan barat merupakan daerah dengan ketinggian bergelombang dan berbukit, sedangkan daerah timur dan selatan merupakan daerah yang relatif datar, meskipun berada pada ketinggian  $\pm 800$  M dari permukaan laut. Kota Batu memiliki suhu minimum  $18^{\circ}$ - $24^{\circ}$ C, suhu maksimum antara  $28^{\circ}$ - $32^{\circ}$ C dengan kelembaban udara sekitar 75-98% dengan volume curah hujan rata-rata 298 mm per bulan dalam kisaran 6 hari per bulan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu, wilayah administratif Kota Batu terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan, Yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji yang terdiri dari 19 Desa dan 5 Kelurahan, 231 RW dan 1.092 RT. Dilihat dari komposisi jumlah desa/kelurahan, Kecamatan Batu mempunyai 8 desa/kelurahan, Kecamatan Junrejo mempunyai 7 desa/kelurahan dan Kecamatan Bumiaji memiliki jumlah desa terbanyak yaitu 9 desa.

**Tabel 4.1 Jumlah Luas Wilayah, Kelurahan/Desa dan Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan di Kota Batu Tahun 2016**

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Luas Wilyah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (ribu)
1.	Batu	8	45,46	94.132
2.	Junrejo	7	25,65	50.079
3.	Bumiaji	9	127,98	58.108

Sumber: Data Diolah berdasarkan Kota Batu dalam Angka, 2017



Berdasarkan tabel 4.1 jumlah luas wilayah, kelurahan/desa dan jumlah penduduk tiap kecamatan di kota batu dapat disimpulkan beberapa hal. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Bumiaji, kemudian diikuti oleh Kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo. Hal tersebut berbanding terbalik dengan sebaran penduduk di setiap kecamatan, dimana antara luas wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk yang ada berbanding terbalik. Kecamatan Bumiaji yang memiliki wilayah paling luas ternyata hanya memiliki penduduk sekitar 58.108 ribu. Jumlah penduduk paling banyak berada pada Kecamatan Batu sekitar 94.132 ribu.

#### **b. Visi dan Misi Kota Batu**

Visi Kota Batu Tahun 2012-2017 yaitu “Kota Batu Sentra Pertanian Organik berbasis kepariwisataan Internasional ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumber daya (alam, manusia dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”

Adapaun misi pembangunan Kota Batu yang telah ditetapkan melalui prors penggalangan aspirasi masyarakat, meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas hidup antar umat beragam.
- 2) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

- 3) Mengembangkan pertanian organik dan perdagangan hasil pertanian organik.
- 4) Meningkatkan posisi peran dari kota sentra pariwisata menjadi kota kepariwisataan internasional.
- 5) Optimalisasi pemerintahan daerah.
- 6) Peningkatan kualitas pendidikan dan lembaga pendidikan.
- 7) Peningkatan kualitas kesehatan.
- 8) Pengembangan infrastruktur (sektor fisik) khususnya perkantoran pemerintah, fasilitas publik, prasarana dan sarana lalu lintas.
- 9) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa, guna meningkatkan pelayanan pelayanan kepada masyarakat.
- 10) Menciptakan stabilitas dan kehidupan politik di kota batu yang harmonis dan demokratis.
- 11) Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan UKM.

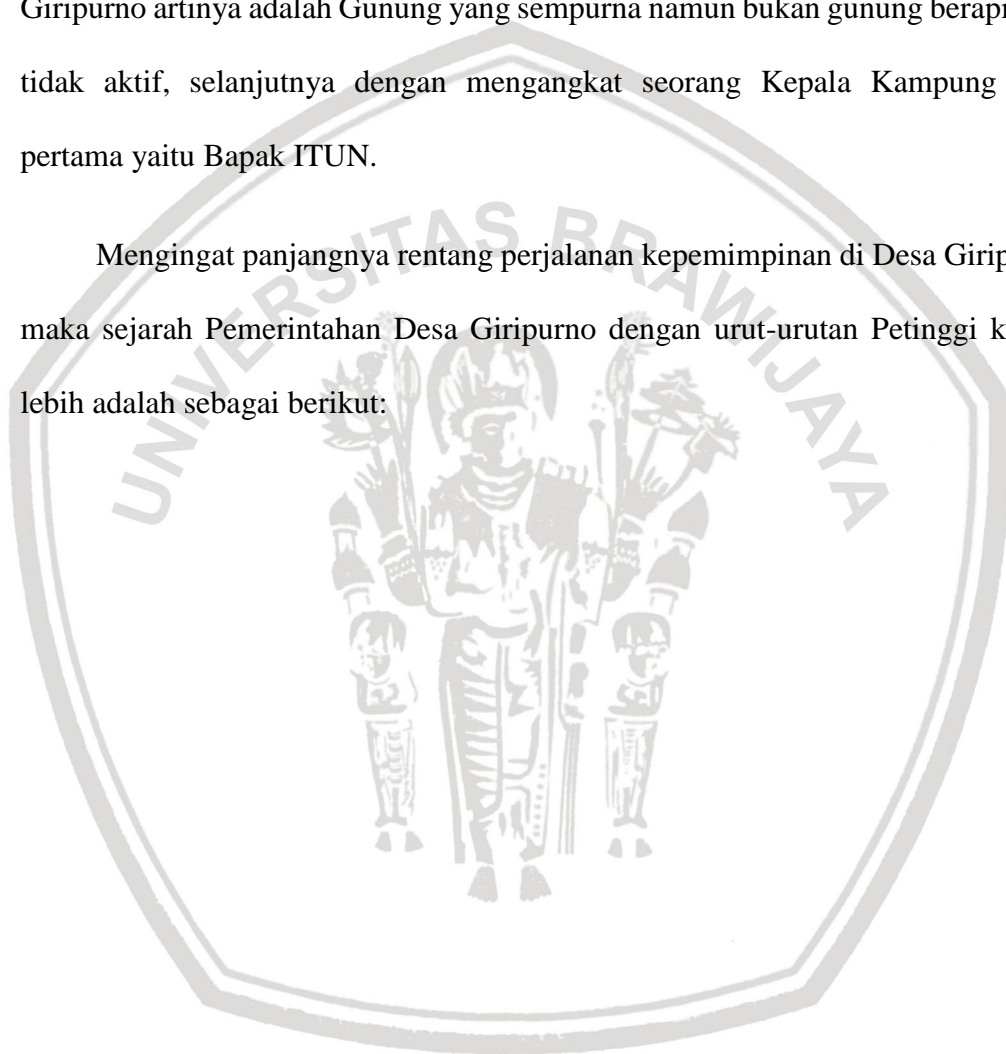
## 2. Gambaran Umum Situs Penelitian

### a. Sejarah Pemerintahan Desa Giripurno

Pada sekitar tahun 1934 datanglah seseorang dari Kerajaan Singosari yang bernama Mbah Singorejo bersama dengan tiga rekannya membuka lahan atau disebut babat alas yang dipergunakan sebagai ladang, sawah dan tempat tinggal, adapun salah satu dari ketiga orang tersebut yaitu bernama BUYUT DARIMAH. Pada tahun 1936 wilayah tersebut dibagi beberapa kelompok babatan lahan yaitu menjadi 6( enam ) bagian. Pertama mengingat sekitar tempat terdapat sebuah sungai yang dipergunakan untuk memandikan ternak berupa Kedung dibawah pohon yang besar, maka bagian tersebut sekarang dinamakan Dusun Kedung. Kedua disebelah bagian Dusun Kedung ditemukan tanaman Ubi dengan sebutan Lajer karena bentuk dan umurnya tanaman tersebut yang selanjutnya dipakai nama dengan sebutan Lajar atau Dusun Krajan mengingat letaknya berada ditengah-tengah Desa. Ketiga di sebelah utara terdapat sebuah sungai yang disekitarnya terdapat pohon Bendo yang sangat besar dan dipergunakan sebagai jembatan untuk menyeberang, maka bagian tersebut dinamakan Dusun Sabrangbendo. Keempat ada bagian yang disekitarnya atau sawah tumbuh rawa-rawa yang akhirnya dinamakan Dusun Sawahan. Kelima dibagian selatan terdapat sungai brantas yang konon banyak para pendatang yang tidak boleh dinikahi oleh orang dari wilayah lain dan bagian tersebut dinamakan Dusun Durek dan yang Keenam adalah bagian paling barat dinamakan Dusun Cembo karena konotasinya kurang baik berdasarkan temuan prasasti yang ditemukan di makam seseorang yang melakukan bedah kerawang ditempat tersebut akhirnya bagian tersebut dinamakan Summersari.

Pada tahun 1938 semua tokoh-tokoh kampung berkumpul guna membuat Pemerintahan Desa yang akhirnya membuat keputusan dengan sebutan GIRIPURNO dari nama Kerajaan Singosari “ Meduran ilang sampurnane “ Giri artinya Gunung atau lereng dan Purno artinya sempurna atau tidak aktif jadi Giripurno artinya adalah Gunung yang sempurna namun bukan gunung berapi yang tidak aktif, selanjutnya dengan mengangkat seorang Kepala Kampung yang pertama yaitu Bapak ITUN.

Mengingat panjangnya rentang perjalanan kepemimpinan di Desa Giripurno, maka sejarah Pemerintahan Desa Giripurno dengan urutan Petinggi kurang lebih adalah sebagai berikut:



**Tabel 4.2 Petinggi di Desa Giripurno**

No	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	Kanjeng Buyut Singorejo	37 Tahun	Tahun 1782 s.d 1819
2	Mbah Sarengat	32 Tahun	Tahun 1819 s.d 1851
3	Mbah Nasemun	16 Tahun	Tahun 1851 s.d 1867
4	Mbah Legimun	12 Tahun	Tahun 1867 s.d 1879
5	Mbah Nasemun	5 Tahun	Tahun 1879 s.d 1884
6	Mbah Gimun P.Sa'Ib	12 Tahun	Tahun 1884 s.d 1896
7	Sa'Ib	4 Tahun	Tahun 1896 s.d 1900
8	Taseri	3 Tahun	Tahun 1900 s.d 1903
9	Giman Pak Tjung	7 Bulan	Tahun 1903 s.d 1903
10	Dakelan Pak Lumpat	10 Tahun	Tahun 1903 s.d 1913
11	Imbran Sumo Dihadjo	16 Tahun	Tahun 1913 s.d 1929
12	Daril Harjo Sampurno	35 Tahun	Tahun 1929 s.d 1964
13	Soerong Sasmito	23 Tahun	Tahun 1964 s.d 1980
14	Nuryasin Mangun Diharjo	10 Tahun	Tahun 1980 s.d 1999
15	Sulijanto	9 Tahun	Tahun 1990 s.d 1999
16	Bagong Santiko	2 Tahun	Tahun 1999 s.d 2002
17	Suma'an	5 Tahun	Tahun 2002 s.d 2008
18	Sudarmaji	6 Tahun	Tahun 2007 s.d 2013
19	Suwanto, SE	6 Tahun	Tahun 2013 s.d 2019

Sumber: Data Diolah berdasarkan Profil Desa Giripurno, 2018



### **b. Kondisi Geografis Desa Giripurno**

Desa Giripurno merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Bumiaji. Daerah ini termasuk daerah pegunungan yang terletak di kaki gunung arjuno dengan ketinggian wilayah mencapai 750 meter sampai dengan 1.050 meter diatas permukaan laut. Adapun batas wilayah Desa Giripurno adalah sebagai berikut:

Sebalah Utara : Gunung Arjuno, Malang

Sebalah Timur :Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

Sebalah Selatan : Desa Giripurno Kecamatan Junrejo

Sebalah Barat : Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji

Desa Giripurno terbagi menjadi 6 Dusun 12 Rukun Warga (RW) dan 78 Rukun Tetangga (RT) antara lain Dusun Summersari terdiri dari 2 RW dan 8 RT, Dusun Kedung terdiri dari 2 RW dan 14 RT, Dusun Krajan terdiri dari 2 RW dan 17 RT, Dusun Sabrangbendo terdiri dari 2 RW dan 12 RT, Dusun Sawahan terdiri dari 2 RW dan 17 RT serta Dusun Durek terdiri dari 2 RW dan 10 RT .

### **c. Kondisi Penduduk**

Karakteristik penduduk di Desa Giripurno dapat dijelaskan berdasarkan golongan umur, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian sesuai data sensus yang

diperoleh dari Kantor Desa Giripurno. Desa Giripurno memiliki jumlah penduduk yang cukup padat yaitu sebesar 10.101 jiwa. Rincian mengenai data penduduk berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3 Karakteristik Penduduk Berdasarkan Usia**

No	Karakteristik Penduduk (Golongan Usia)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	0-15	2.240	22,18
2	16-25	1.542	15,26
3	26-50	4.110	40,69
4	50-60	878	8,7
5	>60	1.331	13,17
<b>Total</b>		<b>10.101</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Diolah berdasarkan Profil Desa Giripurno, 2018*

Berdasarkan tabel 4.3 terkait dengan karakteristik penduduk berdasarkan usia, maka dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk di Desa Giripurno memiliki usia produktif antara 26-50 tahun yang berjumlah 4.110 orang atau sebesar 40,69%. Persentase tertinggi yang kedua adalah penduduk yang memiliki usia wajin sekolah yaitu antara 0-15 tahun yang berjumlah 2.240 orang atau sebesar

22,18%. Dan urutan ketiga adalah golongan remaja yang memiliki kisaran umur 16-25 tahun yang berjumlah 1.542 orang atau sebesar 15,26%. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik penduduk Desa Giripurno berdasarkan golongan umur termasuk beragam dengan sebagian besar penduduk masih masuk dalam usia produktif kerja.

Karakteristik penduduk selain dari golongan usia, juga dapat dilihat berdasarkan mata pencahariannya. Karakteristik penduduk di Desa Giripurno berdasarkan mata pencaharian termasuk beragam dari berbagai sektor pekerjaan mulai dari petani, pedagang, pegawai negeri sipil (PNS), karyawan swasta, TNI, wiraswasta dan buruh pabrik. Karakteristik penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4 Karakteristik Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Petani	2.448	59,00
2	Pedagang	505	12,17
3	PNS	4	0,10
4	Karyawan Swasta	386	9,30
5	TNI	5	0,12
6	Wiraswasta	48	1,16
7	Buruh	753	18,15
		4.149	100

Sumber: Data Diolah berdasarkan Profil Desa Giripurno, 2018

Berdasarkan tabel 4.4 terkait dengan karakteristik penduduk berdasarkan mata pencaharian, dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar penduduk di Desa Giripurno berprofesi sebagai petani dengan persentase 59%. Hal ini juga didukung dengan kondisi wilayah Desa Giripurno yang sebagian besar adalah lahan pertanian.

**Tabel 4.5 Data Sarana Pendidikan Formal di Desa Giripurno**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	2 Unit
2	SD	4 Unit
3	SMP/MI	2 Unit

*Sumber: Data Diolah berdasarkan Profil Desa Giripurno, 2018*

**Tabel 4.6 Data Sarana Pendidikan Non Formal di Desa Giripurno**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Pondok Pesantren	1 Unit
2	PAUD	4 Unit

*Sumber: Data Diolah berdasarkan Profil Desa Giripurno, 2018*

Tingkat pendidikan formal dan non formal di Desa Giripurno termasuk dalam kategori baik. Sarana pendidikan di Desa Giripurno tersedia dan berada di sekitar

lingkungan padat penduduk, sehingga masyarakat Desa Giripurno akan mudah dalam mendapatkan fasilitas pendidikan yang diinginkan.

## **B. Penyajian Data Fokus Penelitian**

### **1. Implementasi program bedah rumah yang masih tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan di Desa Giripurno Kota Batu**

Pada tahap ini, peneliti berusaha memaparkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan berpedoman pada data yang dikumpulkan selama wawancara, observasi dan pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait. Pemaparan data ini disesuaikan dengan fokus penelitian. Fokus penelitian yang telah ditetapkan peneliti ialah ingin mengetahui implementasi program bedah rumah masih tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan di Desa Giripurno Kota Batu, maka peneliti melakukan 3 (tiga) tahapan untuk penilaian dari implementasi program yang dikemukakan oleh Charles O'Jones yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan. Adapun penjelasan dari masing-masing tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a. Organisasi**

Setiap program yang dijalankan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat, tentu ada yang mengelola jalannya program tersebut. Dimana di dalamnya harus memiliki struktur organisasi sebagai pendukung kelancaran suatu program. Begitu pula dengan program bedah rumah yang dalam pelaksanaan harus ada struktur pelaksanaan program. Hal ini sangat perlu agar mempermudah



pelaksanaan program bedah rumah sehingga tepat diberikan kepada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni.

Mengenai struktur pelaksanaan, menurut MD (L:55th) sebagai Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu mengatakan:

“Struktur dalam program bedah rumah ini memiliki keterlibatan dari Dinas Perumahan sendiri, Badan Keuangan Daerah, kelurahan atau desa dan panitia program bedah rumah yang sudah dibentuk di setiap desa atau kelurahan”. (Wawancara yang dilakukan di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu pada tanggal 28 September 2017)

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh NL (L:50th) sebagai Kepala Seksi Perumahan yang mengatakan:

“Pada program bedah rumah di Kota Batu ini ada Dinas Perumahan, panitia program bedah rumah dan BKD”. (Wawancara yang dilakukan di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu pada tanggal 30 Januari 2018)

Dinas perumahan memiliki kewajiban sebagai pelaksana program bedah rumah yang melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, menerima proposal yang diajukan oleh setiap desa/kelurahan, melakukan verifikasi proposal, setelah verifikasi proposal selesai dan sesuai dengan ketentuan maka proses selanjutnya ialah melakukan survei di lapangan. Dinas Perumahan akan menugaskan tim teknis atau biasanya disebut dengan tim verifikasi yang dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas untuk turun kelapangan dan melakukan survei apakah rumah yang diajukan layak untuk dibedah atau tidak.

Tim survei dibantu oleh tim dari desa atau kelurahan yang sudah mengetahui dimana lokasi rumah yang diajukan untuk dibedah karena wilayah Desa Giripurno sangat luas yang menyebabkan kesulitan jika tim survei melakukan pencarian rumah masyarakat yang ingin di bedah. Tugas Desa Giripurno sebagai pihak yang membantu Dinas Perumahan setelah survei yang dilakukan oleh tim verifikasi dari Dinas Perumahan selesai, maka proses selanjutnya ialah persyaratan administrasi yaitu membuka rekening, pemanggilan ketua dan bendahara masing-masing panitia program bedah rumah, penandatanganan pakta integritas, berita acara penyerahan uang, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh NL (L:50th) sebagai Kepala Seksi Perumahan mengatakan:

“ Peran Dinas Perumahan sebagai tim verifikasi. Jadi prosesnya dinas perumahan menerima proposal, melakukan verifikasi proposal yang didalamnya harus dilampirkan surat permohonan dari desa/kelurahan, terlampir fotocopy KTP, Kartu Keluarga (KK), surat keterangan tidak mampu (asli), surat keputusan kepanitian bedah rumah, membuar rinciangan anggaran belanja (RAB), foto fisik rumah yang dibedah, bukti kepemilikan tanah dan merupakan penduduk Kota Batu paling sedikit 2 tahun. Setelah verifikasi proposal sudah lengkap maka proses selanjutnya melakukan survei di lapangan. Survei di lapangan ini dilakukan oleh tim verifikasi yang sudah dibentuk oleh Dinas Perumahan. Setelah survei di lapangan sudah selesai, selanjutnya melakukan pengadministrasian pencairan dana. Pengadministrasian disini meliputi buka rekening, pemanggilan ketua dan bendahara masing-masing panitia program bedah rumah, penandatanganan pakta integritas dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak pengguna bantuan sosial bedah rumah tidak layak huni tetapi untuk pencairan dana langsung dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah melalui Bank Jatim”. (Wawancara yang dilakukan di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu pada tanggal 30 Januari 2018)

Tugas Bank Jatim hanya sebagai pihak pelaksana yang memiliki tugas untuk membuat rekening dan menyalurkan bantuan dalam bentuk uang yang telah ditentukan sebelumnya oleh Dinas Perumahan. Selain itu tugas Desa Giripurno

sebagai pihak yang membantu Dinas Perumahan dalam proses pelaksanaan program bedah rumah meliputi data rumah yang tidak layak untuk di huni dari RT dan RW, mengawasi proses berjalanya program bedah rumah dari awal sampai akhir. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh SP (L:49th) sebagai Kasi Kesra Desa Giripurno sebagai berikut:

“Tugas dari Desa Giripurno disini adalah ikut merencanakan rumah yang akan di bedah, mendata rumah dari tiap-tiap RT, RW yang memiliki rumah tidak layak untuk dihuni, ikut membantu koordinasi antara panitia program bedah rumah yang ada di desa dengan pemerintah”. (Wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Giripurno pada tanggal 31 Januari 2018)

Selanjutnya tim pelaksana dari program bedah rumah adalah panitia program bedah rumah yang ada di setiap desa atau kelurahan. Panitia program bedah rumah yang ada di setiap desa atau kelurahan terdiri dari ketua, sekertaris, dan bendahara yang memiliki tugas sebagai pelaksana teknis yakni membuat proposal untuk pengajuan program bedah rumah, melakukan pengadaan barang untuk rumah yang ingin di bedah serta ikut membantu proses pembangunan rumah tersebut dan membuat laporan pertanggungjawaban rumah yang telah dibedah. Seperti yang diungkapkan oleh TB (L:48) sebagai bendahara panitia program bedah rumah di Dusun Sawahan RT 12 RW 03 sebagai berikut:

“Peran panitia dalam program bedah rumah ini dari awal sampai selesai. Dari kita membuat proposal, pencairan, proses pembangunan dan membuat lpj. Dinas Perumahan hanya melakukan survei ke lapangan. Desa hanya mendata saja”. (Data wawancara yang dilakukan di Rumah Bapak Tabri di Dusun Sawahan pada tanggal 1 Februari 2018)

Hal yang sama disampaikan oleh penerima bantuan program bedah rumah yaitu SN (P:52th) di Dusun Sawahan RT 23 RW 03 yang mengatakan:

“Setahu saya semua ini yang ngurus panitia. Dari persyaratanya sampai rumah ini di bedah. Pemerintah iya pernah kesini. Saat melakukan survei. Kalau aparat desa tidak pernah ngecek kesini mbak”. (Wawancara yang dilakukan di Rumah Ibu Siani di Dusun Sawahan pada tanggal 1 Februari 2018)

Jumlah pelaksana program bedah rumah dilihat dari seberapa banyak pihak yang terlibat dalam program tersebut. Pihak yang terlibat dalam program bedah rumah di Desa Giripurno Kota Batu ialah panitia program bedah rumah yang terdiri dari ketua, sekertaris dan bendahara. Seperti yang diungkapkan oleh SP (L:49th) sebagai Kasi Kesra Desa Giripurno yang mengatakan:

“Dalam program bedah rumah ini kita membentuk panitia sendiri. Setiap dusun punya panitianya. Panitia program bedah rumah disini terdiri dari ketua, sekertaris, dan bendahara. Panitia itu semuanya bertanggung jawab dalam pelaksanaan rumah yang dibedah sampai dengan selesai”. (Wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Giripurno pada tanggal 31 Januari 2018)

Hal ini senada yang disampaikan oleh SY (L:48th) sebagai bendahara panitia program bedah rumah di Dusun Krajan RT 41 RW 06 yang mengatakan:

“Hanya panitia yang terdiri dari ketua, sekertaris dan bendahara yang jadi pelaksana. Ada juga dari masyarakat yang terkadang membantu kami dalam pembangunan rumah. Disini masyarakatnya masih mau gotong royong membantu”. (Wawancara yang dilakukan di Rumah Bapak Supriyadi di Dusun Krajan pada tanggal 3 Februari 2018)

Peneliti kemudian menanyakan terkait jumlah pelaksana kepada MD (L:55th) sebagai Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kota Batu, untuk mengetahui secara pasti mengenai jumlah pelaksana program bedah rumah. Namun dalam wawancara tersebut, beliau tidak menyebutkan jumlah pelaksana, hanya menyebutkan pihak-pihak yang menjadi pelaksana dalam program bedah rumah. Seperti pernyataan berikut ini:

“Dari dinas perumahan ini di tanganin oleh Seksi Perumahan Kota Batu. Lalu ada panitia program bedah rumah di setiap desa atau kelurahan”. (Wawancara yang dilakukan di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu pada tanggal 30 Januari 2018)

Untuk mengetahui penilaian dan pendapat mengenai kemampuan dari pelaksana program bedah rumah di Desa Giripurno Kota Batu ini, peneliti melakukan wawancara kepada informan terkait kemampuan pelaksanaan dalam program bedah rumah. Menurut NL (L:50th) sebagai Kepala Seksi Perumahan Kota Batu mengatakan:

“Sejauh ini cukup baik. Disini kita berharap juga harus ada keterlibatan dari masyarakat supaya meringankan beban dari penerima bantuan”. (Wawancara yang dilakukan di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu pada tanggal 30 Januari 2018)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kasi Kesra Desa Giripurno yaitu SP (L:49th) yang mengatakan:

“Pelaksanaanya cukup baik. Panitia bekerja dengan baik, ini bisa dilihat dari tahun ini 2017 program bedah rumah yang di anggarkan oleh pemerintah kepada Desa Giripurno sebanyak 21 rumah dan saat ini terealisasi 21 rumah juga”. (Wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Giripurno pada tanggal 31 Januari 2018)



Hal yang sama disampaikan oleh TB (L:48th) sebagai Bendahara panitia program bedah rumah di Dusun Sawahan RT 12 RW 03 yang mengatakan:

“Menurut saya, saya sebagai panitia program bedah rumah di Dusun Sawahan Desa Giripurno kemampuannya cukup baik. Panitia bekerja dengan baik. Kalau Dinas perumahan dan desa sudah melakukannya dengan baik, tetapi ketika di lapangan kita terkadang kerepotan. Misalnya dalam hal anggaran yang kurang, karena tukang kan tidak boleh di masukan dalam RAB, itu membuat kerepotan untuk mengatur jadwal tukang. Selebihnya lebih ke teknis saja”. (Wawancara yang dilakukan di Rumah Bapak Tabri Dusun Sawahan pada tanggal 1 Februari 2018)

Kemampuan pelaksana tidak hanya dilihat dari pendataan rumah yang ingin mendapatkan bantuan program bedah rumah, verifikasi, maupun pada saat membantu penerima dalam proses pendaftaran. Akan tetapi, para pelaksana program bedah rumah juga harus bisa menguasai komputer. Hal ini dikarenakan dalam proses administrasi seperti pembuatan proposal, laporan pertanggung jawaban, rekapitulasi data nama-nama penerima bantuan program bedah rumah juga menggunakan komputer. Walaupun keahlian menguasai komputer bukan persyaratan kompetensi bagi panitia program bedah rumah atau pun dari aparat Desa dan masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh SP (L:49th) sebagai Kasi Kesra Desa Giripurno yang mengatakan:

“Panitia harus bisa menguasai komputer. Karena ini penting sekali untuk syarat-syarat administrasinya seperti pembuatan proposal sampai dengan laporan pertanggungjawaban”. (Wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Giripurno pada tanggal 31 Januari 2018)

Di dalam suatu program tentu harus mempersiapkan perlengkapan atau alat-alat kerja yang dapat mendukung kelancaran dari program tersebut termasuk

program bedah rumah. Dalam pelaksanaannya, program bedah rumah juga mempersiapkan terselenggaranya program tersebut dengan baik. Perlengkapan yang di gunakan dalam program bedah rumah adalah persyaratan-persyaratan yang dapat diajukan untuk mendapatkan bantuan program bedah rumah, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), proposal pengajuan, surat tanah asli, surat keterangan tidak mampu, surat permohonan, foto fisik rumah yang dibedah, rincian anggaran belanja (RAB) dan surat keputusan kepanitian bedah rumah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh NL (L:50th) sebagai Kepala Seksi Perumahan Kota Batu yang mengatakan:

“Masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan program bedah rumah ini pastinya harus di data dulu oleh RT, RW, Desa atau Kelurahan. Setelah di data nanti diajukan dengan syarat-syarat yang sudah di tentukan seperti pembuatan proposal, dimana dalam pembuatan proposal itu terdapat berkas-berkas yang harus dilengkapi seperti surat permohonan yang diketahui oleh desa atau lurah, fotocopy ktp, kk, surat keterangan tidak mampu, surat keputusan kepanitian bedah rumah, rincian anggaran belanja, foto fisik rumah yang dibedah, bukti kepemilikan tanah”. (Wawancara yang dilakukan di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu pada tanggal 30 Januari 2018)

Hal ini dipertegas oleh pernyataan dari MD (L:55th) sebagai Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu yang mengatakan:

“Syarat program bedah rumah yang pertama kita tanyakan dulu status tanah. Jika tanah itu adalah tanah warisan, tidak boleh. Takutnya nanti kejadian yang enggak-enggak. Selain itu juga ada data-data yang harus dilengkapi seperti ktp, kk, surat keterangan tidak mampu atau keterangan dari desa. Selanjutnya kita langsung survei apakah rumah ini benar-benar layak untuk di bedah. Sehingga bisa tepat sasaran”. (Wawancara yang dilakukan di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu pada tanggal 28 September 2017)

### **b. Interpretasi**

Pada proses interpretasi yang dimaksud di sini adalah menafsirkan agar sebuah program, khususnya program bedah rumah ini menjadi rencana dan pengarahan yang tepat agar dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Agar rencana dan pengarahan dapat dilaksanakan dengan baik, maka sebelumnya perlu mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab pada program tersebut. Orang-orang yang bertanggung jawab pada program tersebut juga harus dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Selain itu dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Peneliti kemudian mencari tahu mengenai siapa saja yang bertanggung jawab dalam program bedah rumah. Peneliti menanyakan hal tersebut kepada MD (L:55th) sebagai Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu. Beliau memberikan penjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam program bedah rumah. Seperti penjeleasaanya berikut ini:

“Dulu program bedah rumah ditangani oleh Kesra, namun pada tahun 2017 pelaksanaannya diserahkan kepada Dinas Perumahan. Yang bertanggung jawab dalam program bedah rumah disini panitia program bedah rumah yang sudah dibentuk pada tiap desa atau kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah. Dinas perumahan hanya sebagai pejabat teknis yang langsung turun ke lapangan. Untuk dilapangnya itu dilakukan oleh Kepala Seksi Perumahan”. (Wawancara yang dilakukan di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu pada tanggal 28 September 2017)

Peneliti mencoba untuk menanyakan hal yang sama terkait siapa yang bertanggung jawab dalam program bedah rumah kepada NL (L:50th) sebagai Kepala Seksi Perumahan Kota Batu yang mengatakan:

“Yang bertanggung jawab dalam program bedah rumah ini adalah panitia program bedah rumah yang ada di setiap desa atau kelurahan. Dulu kan program ini punya Kesra namun sekarang diserahkan kepada BKD, namun karena BKD bukan pejabat teknis maka diserahkan kepada Dinas Perumahan. Dinas Perumahan disini yang menyeleksi proposal yang masuk, survei langsung ke desa, menetapkan anggaran yang akan diberikan kepada masyarakat.” (Wawancara yang dilakukan di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu pada tanggal 30 Januari 2018)

Selain itu juga dijelaskan oleh Peraturan Walikota Batu Nomor 42 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemberian Dana Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni Bagian Keempat Pasal 9 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Panitia bedah rumah tingkat desa atau kelurahan bertanggung jawab untuk melaporkan penggunaan dana bantuan bedah rumah tersebut.
- 2) Pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan dibuat dengan melampirkan bukti nota, kwitansi, foto atau dokumentasi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan selesai dilaksanakan.
- 3) Seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Walikota melalui Badan Keuangan Daerah atau Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tembusan Dinas Sosial paling lama 15 (lima belas) hari setelah kegiatan bedah rumah selesai.

Peneliti mencoba mencari tahu siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program beda rumah di Desa Giripurno Kota Batu. Peneliti melakukan

wawancara dengan SP (L:49) sebagai Kasi Kesra Desa Giripurno yang mengatakan bahwa:

“ Di Desa Giripurno yang bertanggung jawab adalah panitianya. Kita hanya sebagai pengawas saja, membantu mendata rumah yang tidak layak huni”. (Wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Giripurno pada tanggal 31 Januari 2018)

Peneliti juga mewawancarai panitia program bedah rumah yang ada di Desa Giripurno yaitu TB (L:48) sebagai Bendahara panitia program bedah rumah di Dusun Sawahan RT 12 RW 03 yang mengatakan:

“Panitia disini bertanggung jawab langsung mbak kepada pemerintah atau Dinas Perumahan dari proses pembangunan rumah sampai dengan rumah ini selesai di bedah dan pembuatan laporan pertanggungjawaban.” (Wawancara yang dilakukan di Rumah Bapak Tabrani Dusun Sawahan pada tanggal 1 Februari 2018)

Selain itu peneliti mencoba untuk mencari informasi terkait kinerja dari pelaksana atau orang-orang yang menjalankan program bedah rumah di Desa Giripurno. Salah satunya adalah kepada masyarakat penerima bantuan program bedah rumah yakni SN (P:52th) di Dusun Sawahan RT 23 RW 03 yang mengatakan:

“Panitianya cukup baik. Mereka yang mengurus rumah ini dari awal sampai selesai. Dari desa tidak pernah ada, semua yang bantu dari panitia. Dinas perumahan saat itu hanya survei saat rumah saja.”. (Wawancara yang dilakukan di Rumah Ibu Siani di Dusun Sawahan pada tanggal 1 Februari 2018)

Hal yang sama disampaikan oleh penerima bantuan program bedah rumah yakni TK (P:49) di Dusun Krajan RT 41 RW 06 yang mengatakan:



“Saya kira panitia sudah bagus. Karena mulai dari pengajuan sampai rumah ini selesai di bedah panitia cukup membantu mbak”. (Wawancara yang dilakukan di Rumah Ibu Trikuri di Dusun Krajan pada tanggal 3 Februari 2018)

Penilaian kinerja dari para pelaksana program bedah rumah tidak hanya melihat dari pihak Desa atau Kelurahan dan panitia program bedah rumah saja. Akan tetapi, kinerja dari Dinas Perumahan pun patut untuk dinilai. Beberapa informan memberikan pandangannya terhadap kinerja dari Dinas Perumahan. Salah satunya adalah TB (L:48th) sebagai bendahara panitia program bedah rumah di Dusun Sawahan RT 12 RW 03 yang mengatakan:

“Saya kira untuk masalah program dan kinerja dari Dinas Perumahan sudah bagus. Karena mulai dari pengajuan sampai pemberian bantuan program bedah rumah telah diverifikasi terlebih dahulu”. (Wawancara yang dilakukan di Rumah Bapak Tabrani Dusun Sawahan pada tanggal 1 Februari 2018)

Namun berberda halnya dengan pendapat yang disampaikan oleh penerima bantuan program bedah rumah yakni SN (P:52) di Dusun Sawahan RT 23 RW 03 yang mengatakan:

“Kinerjanya baik, hanya terkadang Dinas perumahan hanya ada saat survei rumah saja. Saat proses pembangunan rumah tidak ada. Yang ada hanya panitia dan masyarakat disini yang membantu pembangunan”. (Wawancara yang dilakukan di Rumah Ibu Siani di Dusun Sawahan pada tanggal 1 Februari 2018)

Hal yang sama diungkapkan oleh SY (L:48) sebagai Panitia program bedah rumah sebagai Bendahara di Dusun Krajan RT 41 RW 06 yang mengatakan:

“Sudah baik. Tetapi kadang-kadang kita kewalahan juga sebagai panitia dalam program bedah rumah ini, soalnya kan kita yang melaksanakan di

lapangan. Mungkin Dinas Perumahan bisa menggerakkan masyarakat atau aparat desa supaya membantua panitia”. (Wawancara yang dilakukan di Rumah Bapak Supriyadi di Dusun Krajan pada tanggal 3 Februari 2018)

Selain itu peneliti juga mencari tahu bagaimana koordinasi yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait program bedah rumah. Peneliti melakukan wawancara oleh MD (L:55th) sebagai Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu yang mengatakan:

“Kita pasti berkoordinasi dengan tiap pihak seperti desa atau kelurahan, panitia program bedah rumah. Koordinasi itu bisa dilakukan *by phone*, bertemu langsung. Selama ini cukup berjalan dengan baik. Kita juga melakukan koordinasi dengan BKD saat proses proposal dan survei telah dilaksanakan dengan memberikan proposal tersebut kepada BKD dan proses selanjutnya untuk pencairan dana diserahkan oleh BKD melalui Bank Jatim”. (Wawancara yang dilakukan di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu pada tanggal 28 September 2017)

Penliti juga menanyakan hal yang sama dengan Kasi Kesra Desa Giripurno yaitu SP (L:49) yang mengatakan:

“Pasti dong kita selalu koordinasi dengan Dinas Perumahan. Juga sebaliknya dari Dinas. Begitu pula dengan panitianya, kita juga berkoordinasi”. (Wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Giripurno pada tanggal 31 Januari 2018)

Lebih lanjut, dari pihak panitia program bedah rumah yaitu TB (L:48) sebagai Bendahara panitia program bedah rumah di Dusun Sawahan RT 12 RW 03 yang mengatakan:

“Dalam hal ini alhamdulillah kita selalu berkoordinasi lah dengan dinas. Saya juga tidak berani kalau tidak melakukan koordinasi baik kepada dinas dengan

desa”. (Wawancara yang dilakukan di Rumah Bapak Tabrani Dusun Sawahan pada tanggal 1 Februari 2018)

Selanjutnya peneliti mencoba mencari tahu pendapat dari informan mengenai pelaksanaan program bedah rumah. Peneliti melakukan wawancara dengan NL (L:50th) sebagai Kepala Seksi Perumahan Kota Batu yang mengatakan:

“Pelaksanaanya selama ini sudah cukup baik. Kan kita juga ada peraturan walikota yang mengatur siapa saja yang berhak menerima bantuan ini dan syarat-syaratnya seperti apa. Bantuan diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki rumah yang layak untuk di huni. Dana yang diberikan sekitar 15 juta sampai dengan 35 juta tergantung kerusakan”. (Wawancara yang dilakukan di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu pada tanggal 30 Januari 2018)

Adapun informan lainnya mengatakan bahwa dana yang dianggarkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu untuk program bedah rumah dinilai belum cukup. Hal ini diungkapkan oleh TB (L:48th) sebagai Panitia program bedah rumah sebagai Bendahara di Dusun Sawahan RT 12 RW 03 yang mengatakan:

“Program bedah rumah ini menurut saya bagus sekali. Program ini sangat membantu masyarakat miskin yang memiliki rumah yang tidak layak huni. Hanya memang dana yang diberikan oleh pemerintah sekitar 15 juta sampai 35 juta itu tidak cukup. Seperti rumah ibu siani ini hanya bisa mengecor atapnya, beli batu dan memperbaiki depan rumahnya, beli jendela, pintu. Tapi alhamdulillah memang ibu siani sudah memiliki tabungan sendiri untuk menutupi kekurangan dananya”. (Data wawancara yang dilakukan di Rumah Bapak Tabri Dusun Sawahan pada tanggal 1 Februari 2018)

Untuk menutupi kekurangan dana ketika pelaksanaan program bedah rumah, maka ada diantara penerima bantuan program bedah rumah menabung terlebih

dahulu untuk menutupi kekurangan tersebut. Hal ini dialami oleh para penerima bantuan program bedah rumah di Desa Giripurno Kota. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu penerima bantuan program bedah rumah yaitu SN (P:52th) di Dusun Sawahan RT 23 RW 03 yang mengatakan:

“Program bedah rumah ini sangat baik. Alhamdulillah rumah saya bisa divedah. Dulu ini rumah saya jelek. Kalau hujan bisa banjir. Sekarang alhamdulillah udah enggak. Ya tapi memang dana yang saya terima dari pemerintah sekitar 25an juta itu gak cukup untuk rumah ini. Tapi saya kerja mbak di pasar jualan sayur, sehari nabung. Kalau ada yang kurang saya pakai tabungan saya”. (Wawancara yang dilakukan di Rumah Ibu Siani di Dusun Sawahan pada tanggal 1 Februari 2018)

Di Desa Giripurno untuk tahun 2017 masih banyak rumah yang tidak layak huni dan belum sepenuhnya mendapat bantuan program tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh SP (L:49) sebagai Kasi Kesra Desa Giripurno yang mengatakan:

“Sebetulnya di Desa Giripurno ini masih banyak yang harus mendapat bantuan program bedah rumah. Pada tahun 2018 ini ada 93 rumah tidak layak huni, tahun ini kita akan mengajukan 12 rumah yang akan divedah kepada pemerintah. Pada tahun 2017 kemaren ada 113 rumah yang tidak layak huni. Alhamdulillah rumah yang berhasil divedah sebanyak 21 rumah”. (Wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Giripurno pada tanggal 31 Januari 2018)

Peneliti juga memperoleh data terkait rumah yang diberi bantuan program bedah rumah di Desa Giripurno pada tahun 2017. Desa Giripurno merupakan desa yang paling banyak menerima bantuan program bedah rumah yang ada di Kota Batu. Adapun data-data rumah yang divedah di Desa Giripurno pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.7 Data Penerima Program Bedah Rumah di Desa Giripurno Kota Batu**

No	Nama	Alamat	Nominal
1.	Surateman	Durek RT 06 RW 02	Rp. 30.000.000,-
2.	Siani	Sawahan RT 12 RW 03	Rp. 25.932.000,-
3.	Bambang	Sawahan RT 23 RW 04	Rp. 16.804.000,-
4.	Rokim	Sawahan RT 16 RW 03	Rp. 25.000.000,-
5.	Trikuri	Krajan RT 41 RW 06	Rp. 33.176.000,-
6.	Erik Dwi	Krajan RT 36 RW 06	Rp. 24.041.000,-
7.	Saminah	Krajan RT 40 RW 06	Rp. 35.000.000,-
8.	Defi Feri	Krajan RT 31 RW 05	Rp. 35.000.000,-
9.	Sofiyah	Sabrangbendo RT 55 RW 08	Rp. 15.609.000,-
10.	Satumi	Sabrangbendo RT 50 RW 08	Rp. 35.000.000,-
11.	Sumini	Sabrangbendo RT 55 RW 08	Rp. 35.000.000,-
12.	Dian Andrianto	Sabrangbendo RT 52 RW 08	Rp. 35.000.000,-



No	Nama	Alamat	Nominal
13.	Lasto	Sabrangbendo RT 54 RW 08	Rp. 35.000.000,-
14.	Sabari	Sabrangbendo RT 47 RW 07	Rp. 35.000.000,-
15.	Supangkat	Sumbersari RT 74 RW 11	Rp. 33.240.000,-
16.	Yunanik	Sumbersari RT 75 RW 12	Rp. 35.000.000,-
17.	Katiyo	Sumbersari RT 76 RW 12	Rp. 35.000.000,-
18.	Muntono	Sumbersari RT 78 RW 12	Rp. 35.000.000,-
19.	Mujianti	Sumbersari RT 75 RW 12	Rp. 35.000.000,-
20.	Muntiani	Sumbersar RT 74 RW 11	Rp. 35.000.000,-
21.	Supiyah	Sumbersari RT 78 RW 12	Rp. 25.000.000,-

*Sumber : Data Oleh Peneliti, 2017*

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa esensi dari pelaksanaan program bedah rumah adalah menumbuhkan kembali rasa gotong royong dan kesetiakawanan sosial yang mulai pudah di tengah masyarakat. Peneliti mencoba melakukan wawancara dengan penerima bantuan program bedah rumah yakni SN di Dusun Sawahan RT 23 RW 03 yang mengatakan:

“Alhamdulillah membantu mbak. Pasti bersyukur masalah kemiskinan sedikit tenang. Karena ada bantuan dari pemerintah. Masyarakat disini juga ikut membantu. Tidak hanya tukang saja yang mengerjakan ini”. (Wawancara yang dilakukan di Rumah Ibu Siani di Dusun Sawahan pada tanggal 1 Februari 2018)

Hal yang sama disampaikan dengan salah satu panitia program bedah rumah yang ada di Desa Giripurno yaitu TB (L:48) sebagai bendahara panitia program bedah rumah di Dusun Sawahan RT 12 RW 03 yang mengatakan:

“Dalam proses bedah rumah ini kita juga pakai tukang. Selain itu disini rasa gotong royong masih kuat mbak. Jadi disini kita cukup terbantu dalam perehaban rumah. Ya walaupun gaji tukang tidak ada dalam anggaran. Ini lah yang menjadi kendalanya. Anggaranya biasanya tidak cukup untuk membayar tukang”. (Wawancara yang dilakukan di Rumah Bapak Tabrani Dusun Sawahan pada tanggal 1 Februari 2018)

### c. Penerapan

Penerapan adalah suatu tahapan dimana peraturan atau kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis berjalan sesuai dengan ketentuan. Untuk dapat melihat ini harus dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja dan jadwal kegiatan. Sebelum melaksanakan suatu program, harus ada perencanaan program terlebih dahulu. Hal ini perlu dilakukan agar mempermudah untuk menentukan apa saja yang harus dikerjakan, serta lebih mudah untuk melaksanakan program. Seperti program bedah rumah, dimana harus ada perencanaan yang matang agar program tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

Pengajuan awal untuk mendapat bantuan program bedah rumah ialah masyarakat diminta untuk melengkapi berkas-berkas yang telah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Batu Nomor 42 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemberian Dana Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh NL (L:50th) sebagai Kepala Seksi Perumahan Kota Batu yang mengatakan:

“pengajuan awalnya sudah sesuai. Artinya dalam persyaratan kita mudah. Sudah saya ketikan disini syaratnya apa-apa saja . tiap panitia atau desa bisa langsung bertanya kepada saya persyaratanya apa saja. Nanti setelah lolos proposalnya baru kita kirimkan tim verifikasi untuk mensurvei langsung rumah yang ingin dibedah. Pemerintah biasanya setiap tahun memberikan kuota 100 rumah yang akan diberi bantuan dana. Jika sudah sesuai dan benar-benar membutuhkan nanti itu akan keluar SK dari pemerintah sebagai penerima program bedah rumah”. (Wawancara yang dilakukan di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu pada tanggal 30 Januari 2018)

Pengajuan awal yang dibuat oleh para pendaftar nanti akan di seleksi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu dan disesuaikan dengan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya akan di survei oleh Tim Verifikasi agar bantuan program bedah rumah menjadi tepat sasaran. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh SP (L:49th) sebagai Kasi Kesra Desa Giripurno:

“Kalau saya bilang sesuai dengan rencana yang sudah diprogramkan dari awal. Program ini bagus. Harapnya program ini bisa dilanjutkan walaupun saat ini dalam pelaksanaanya ternyata kurang dana. Diharapkan pemerintah bisa mempertimbangkan atau menambah lagi anggaran dananya”. (Wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Giripurno pada tanggal 31 Januari 2018)

Peneliti juga melakukan wawancara tentang sasaran bantuan program bedah rumah apakah sudah tepat atau belum dengan bagian Kasi Kesra Desa Giripurno yaitu SP (L:49) yang mengatakan:

“Program ini memang sudah tepat. Yang mendapat bantuan bedah rumah adalah orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Tidak hanya dilihat dari fisik saja, maksudnya rumahnya yang tidak layak huni namun latarbelakang orangnya seperti simpananya. Soalnya ada yang rumahnya tidak layak huni tetapi punya simpanan sapi dua, sawah. Ini juga menjadi pertimbangan”. (Wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Giripurno pada tanggal 31 Januari 2018)

. Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh MD (L:55th) sebagai Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu yang mengatakan:

“Program bedah rumah ini sudah tepat sasaran, membantu mengurangi angka kemiskinan di Kota Batu pastinya, khususnya dari sisi rumah tinggal. setiap tahun berkurang sekitar 100. Soalnya kan tiap tahun pemerintah selalu ada program bedah rumah yang kuotanya sebesar 100 rumah”. (Wawancara yang dilakukan di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu pada tanggal 28 September 2017)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Perumahan sebagai pihak yang melakukan verifikasi ke lapangan melihat apakah rumah tersebut layak untuk mendapat bantuan atau tidak. Menurut NL (L:50th) mengatakan:

“Adanya verifikasi ini menjadi tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar layak untuk di bantu. Soalnya kan kita langsung turun lapangan melihat kondisi masyarakat yang tidak memiliki rumah yang layak untuk di huni”. (Wawancara yang dilakukan di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu pada tanggal 30 Januari 2018)

Untuk melihat apakah program ini tepat diberikan kepada yang membutuhkan, maka diperlukan verifikasi ke lapangan. Peneliti mencoba untuk mewawancarai salah satu panitia di Desa Giripurno Kota Batu untuk menanyakan hal terkait apakah program bedah rumah ini sudah tepat sasaran. Salah satunya adalah TB (L:48th) sebagai bendahara panitia program bedah rumah di Dusun Sawahan RT 12 RW 03 yang mengatakan:

“Kalau ketepatan saya kira sudah tepat. Karena kan ini juga diputuskan oleh aparat desa. Sebelum itu kita juga ada musdes, ada rapat RT, RW terkait rumah siapa saja yang layak untuk mendapatkan bantuan ini”. (Wawancara yang dilakukan di Rumah Bapak Tabri Dusun Sawahan pada tanggal 1 Februari 2018)

Hal yang sama juga disampaikan oleh panitia program bedah rumah yang ada di Desa Giripurno Kota Batu yakni SY (L:48th) sebagai bendahara panitia program bedah rumah di Dusun Krajan RT 41 RW 06 yang mengatakan:

“Kalau untuk program bedah rumah sudah tepat sasaran”. (Wawancara yang dilakukan di Rumah Bapak Supriyadi di Dusun Krajan pada tanggal 3 Februari 2018)

Namun penerima program bedah rumah yakni SN (P:52th) di Dusun Sawahan RT 23 RW 03 mengatakan bahwa:

“Disini untuk penerima program bedah rumah masih dilihat dari kedetan dengan panita, misalnya seperti saudara deketnya atau deket dengan panitia atau orang desa. Padahal sebenarnya rumah masih bisa dihuni, disini masih ada yang lebih parah lagi”. (Wawancara yang dilakukan di Rumah Ibu Siani di Dusun Sawahan pada tanggal 1 Februari 2018)



Peneliti juga mencari tahu bagaimana ketepatan nominal yang diberikan kepada masyarakat. Menurut beberapa informan yang peneliti wawancarai yakni TB (L:48) sebagai bendahara panitia program bedah rumah di Dusun Sawahan RT 12 RW 03 yang mengatakan:

“Untuk masalah nominal, saya pikir lebih baik ditambahkan. Karena bantuan yang diberikan sekitar 25-35 juta itu tidak cukup untuk merehab rumah. Soalnya itu tidak termasuk biaya tukang, dengan kondisi rumah yang tidak layak huni itu tidak cukup”. (Wawancara yang dilakukan di Rumah Bapak Tabri Dusun Sawahan pada tanggal 1 Februari 2018)

Hal yang sama juga disampaikan oleh panitia program bedah rumah yang ada di Desa Girpurno Kota Batu yakni SY (L:48th) sebagai bendahara panitia program bedah rumah di Dusun Krajan RT 41 RW 06 yang mengatakan:

“Kendalanya itu di dana. Dana yang diberikan tidak cukup untuk merehab rumah. Memperbaiki atap, dinding, lantai, belum bayar tukang. Masyarakat yang saya tangani seperti bu siani ini untung saja memiliki uang tabungan sendiri untuk bisa membantu membeli barang-barang yang kurang”. (Wawancara yang dilakukan di Rumah Bapak Supriyadi di Dusun Krajan pada tanggal 3 Februari 2018)

Agar pelaksanaan program sesuai dan tepat sasaran, maka diperlukan prosedur pelaksanaan. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan program bedah rumah memiliki mekanisme program yang jelas supaya tidak menyimpang. Kemudian pelaksanaan program pun diatur dan memiliki arahan yang jelas. Seperti hal nya program bedah rumah, tentunya memiliki prosedur dalam melaksanakan program tersebut. Maka dari itu, peneliti melakukan wawancara kepada NL (L:50th) sebagai Kepala Seksi Perumahan Kota Batu yang mengatakan:

“Program bedah rumah ini kan punya SOP nya yaitu perwali. Peraturan Walikota Batu Nomor 42 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemberian Dana Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni Disitu dijelaskan terkait dananya, sasaranya, tujuanya. Selain itu dijelaskan bahwa program bedah rumah di Kota Batu ini berupa bantuan uang. Uang yang dianggarkan sebesar 15-35 juta tergantung kerusakanya. Yang menentukan dana itu nanti dari kita, setelah kita sudah melakukan survei ke lapangan melihat kondisi fisik rumah yang tidak layak huni”. (Wawancara yang dilakukan di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu pada tanggal 30 Januari 2018)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan MD (L:55th) sebagai Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu yang mengatakan:

“Pastiah harus sesuai dengan prosedur. Pernah kejadian ada orang yang ingin mendapatkan bantuan program bedah rumah, tapi pada saat kita survei rumahnya masih bagus kita coret. Tidak hanya itu pernah kejadian tanah kosong minta di bedah, itu kan tidak bisa. Itu juga kita tidak masukan”. (Wawancara yang dilakukan di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu pada tanggal 28 September 2017)

Peneliti juga ingin mengetahui terkait pelaksanaan prosedur yang selama ini berjalan. Peneliti mencoba untuk melakukan wawancara dengan NL (L:50th) sebagai Kepala Seksi Perumahan Kota Batu yang mengatakan:

“Menurut saya prosedur yang ada sudah bagus. Usulan dari masyarakat juga diketahui oleh RT, RW setempat dan juga ada persetujuan dari lurah atau desa”. (Wawancara yang dilakukan di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu pada tanggal 30 Januari 2018)

Hal yang sama diungkapkan NL (L:50th) sebagai Kepala Seksi Perumahan Kota Batu yang mengatakan:

“Sejauh ini sih masyarakat dalam prosedur tidak ada yang protes ya”. (Wawancara yang dilakukan di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu pada tanggal 30 Januari 2018)

Namun, informan lainya mengatakan bahwa prosedur yang ada belum sesuai dengan pelaksana di lapangan. Maksudnya prosedur dari segi nominal bantuan program bedah rumah yang sebesar Rp. 15.000.000,- sampai dengan Rp. 35.000.000,- dinilai belum cukup untuk melakukan perehaban rumah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh SY (L:48th) sebagai bendahara panitia program bedah rumah di Dusun Krajan RT 41 RW 06 yang mengatakan:

“Untuk anggaran dana itu harus ditambah kalau bisa. Menurut saya dana sekitar 15-35 juta itu sangat kurang. Kalau teknis prosedur itu menurut saya baik. Kalau bisa ada beberapa yang harus di ubah seperti pembiayaan tukang, soalnya kan tidak mungkin tukang tidak di bayar sedangkan proses perehaban rumah 2 bulan harus jadi. Tidak mungkin kita mengharapkan gotong royong terus dari masyarakat. Selain itu pemerintah juga memberi perhatian kepada panitia program bedah rumah”. (Wawancara yang dilakukan di Rumah Bapak Supriyadi di Dusun Krajan pada tanggal 3 Februari 2018)

Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh SP (L:49th) sebagai Kasi Kesra Desa Giripurno yang mengatakan:

“Program ini sebaiknya ada penambahan bantuan. Soalnya di Desa Giripurno masih banyak rumah tidak layak huni. Pada tahun 2017 ini menurut data yang saya punya di Desa Giripurno masih terdapat 113 rumah yang tidak layak huni. Alhamdulillah, tahun 2017 kita mendapat bantuan 21 rumah. Dan pada tahun ini 2018 terdapat 93 rumah tidak layak huni”. (Wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Giripurno pada tanggal 31 Januari 2018)

Untuk memperkenalkan dan memberikan informasi mengenai program bedah rumah kepada masyarakat terutama masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni, maka diperlukan sosialisasi. Peneliti mencoba melakukan wawancara

terkait sosialisasi program bedah rumah dengan NL (L:50th) sebagai Kepala Seksi Perumahan Kota Batu yang mengatakan:

“Program bedah rumah ini kan sudah lama, tiap tahun juga ada. Masyarakat sebenarnya sudah mengetahui . Dan juga ada musdes, musrenbang kita juga membahas program bedah rumah itu juga diadakan di tahun sebelumnya, misalnya kalau program 2017, maka sosialisasinya pada di tahun 2016”. (Wawancara yang dilakukan di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu pada tanggal 30 Januari 2018)

Peneliti mencoba bertanya hal yang sama terkait dengan sosialisasi program bedah rumah ke beberapa informan. Mereka mengatakan bahwa di daerahnya sudah ada sosialisasi mengenai program bedah rumah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh SP (L:49th) sebagai Kasi Kesra Desa Giripurno yang mengatakan:

“Kalau sosialisasi sih pas ada musdes, sebelum musdes kan juga ada rapat RT, RW dari situ tau tentang program bedah rumah. Tapi memang program bedah rumah ini kan juga sudah cukup lama. Jadi masyarakat setahu saya sudah mengetahui tentang program bedah rumah”. (Wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Giripurno pada tanggal 31 Januari 2018)

Senada dengan apa yang disampaikan oleh NL (L:50th) sebagai Kepala Seksi Perumahan Kota Batu, beliau mengatakan:

“Sosialisasi ini dilakukan. Kita kan ada yang namanya musdes, dari musdes nanti dibawa kebawa musrenbang kecamatan, setelah itu ada musrenbang kota nanti kita akan membahas di situ program bedah rumahnya. Selain itu kita juga melakukan koordinasi dengan pihak desa atau kelurahan”. (Wawancara yang dilakukan di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu pada tanggal 30 Januari 2018)

Peneliti juga melakukan wawancara terkait jadwal kegiatan program bedah rumah. Namun tidak semuanya jadwal kegiatan ini sesuai dengan prosedur yang



ada. Salah satunya adalah mengenai waktu pelaksanaan program bedah rumah. Berdasarkan hasil wawancara dengan NL (L:50th) sebagai Kepala Seksi Perumahan Kota Batu yang mengatakan:

“Jadwalnya paling lambat sampai akhir desember, soalnya kan akhir desember semua laporan-laporan harus sudah selesai termasuk laporan mengenai program bedah rumah ini”. (Wawancara yang dilakukan di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu pada tanggal 30 Januari 2018)

Peneliti mencoba untuk menanyakan langsung kepada panitia program bedah rumah yakni TB (L:48th) sebagai bendahara panitia program bedah rumah sebagai Bendahara di Dusun Sawahan RT 12 RW 03 yang mengatakan:

“Kalau jadwalnya sih kayak gak ada ya, soalnya dinas hanya menyampaikan perehaban rumah harus selesai sebelum desember beserta laporan pertanggung jawabanya. Kalau rumah ibu siani ini selesai kurang lebih 2 bulan”. (Wawancara yang dilakukan di Rumah Bapak Tabrani Dusun Sawahan pada tanggal 1 Februari 2018)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terkait jadwal kegiatan program bedah rumah dengan penerima bantuan program bedah rumah di Desa Giripurno Kota Batu seperti yang diungkapkan oleh TK (P:49th) di Dusun Krajan RT 41 RW 06 yang mengatakan:

“Iya lumayan lama. Kemaren saya persyaratan sudah selesai semua, tetapi karena di Dusun Krajan ini ada 4 orang yang menerima bantuan dan ada satu orang yang belum selesai persyaratanya jadi harus menunggu untuk proses pencairan dananya”. (Wawancara yang dilakukan di Rumah Ibu Trikuri di Dusun Krajan pada tanggal 3 Februari 2018)



Adanya ketidakpastian dan keterlambatan dalam proses pencairan dana, juga berpengaruh terhadap jadwal perehaban rumah penerima bantuan. Dimana jadwal perehaban rumah menjadi tidak jelas. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh SY (L:48th) sebagai bendahara panitia program bedah rumah di Dusun Krajan RT 41 RW 06 yang mengatakan:

“Kalau masalah jadwal dalam merehan rumah ini kita kerjaain dulu, sebelum uang nya cair kita udah mulai merehab. Istilahnya kita ngutang dulu sama tukang bangunan. Nanti setelah uangnya cair, baru kita bayar”. (Wawancara yang dilakukan di Rumah Bapak Supriyadi di Dusun Krajan pada tanggal 3 Februari 2018)

Senada dengan apa yang disampaikan oleh TB (L:48) sebagai Bendahara panitia program bedah rumah sebagai bendahara di Dusun Sawahan RT 12 RW 03 yang mengatakan:

“Jadwal pelaksanaanya sering berubah. Tidak tepat waktu. Disini kita dalam merehab rumahnya kita kerjaan dulu setelah sudah keluar SK dari pemerintah. Biasanya kita bayarnya di akhir, jadi merehab rumah dulu, barang-barangnya kita beli di toko bangunan yang bisa diajak kerjasama”. (Wawancara yang dilakukan di Rumah Bapak Tabrani Dusun Sawahan pada tanggal 1 Februari 2018)

Peneliti juga melakukan wawancara terkait bantuan dana yang diterima oleh penerima bantuan program bedah rumah. Ibu Siani merupakan salah satu penerima bantuan program bedah rumah yang ada di Desa Giripurno. Bantuan yang diperoleh dari Pemerintah sebesar Rp 25.932.000,- dinilai kurang cukup karena kebutuhan untuk perehaban rumah tentunya cukup besar. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh SN (P:52th) di Dusun Sawahan RT 23 RW 03 yang mengatakan:

“Ya alhamdulillah sudah di bantu oleh pemerintah, pasti tidak akan cukup. Apalagi dananya segitu. Ini saja hanya atap, depan diperbaiki, pintu dan jendela. Kalau ada yang kurang-kurang ini pakai tabungan saya yang sudah saya sisikan dari hasil kerja saya dari jualan sayuran di pasar. Untuk tukang sendiri juga menggunakan dana sendiri, jadi uang segitu sebenarnya belum cukup untuk merehab rumah”. (Wawancara yang dilakukan di Rumah Ibu Siani di Dusun Sawahan pada tanggal 1 Februari 2018)



**Gambar 4.2 Rumah Ibu Siani sebelum menerima bantuan program bedah rumah**

*Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Program Bedah Rumah, 2017*



**Gambar 4.3 Rumah Ibu Siani setelah menerima bantuan program bedah rumah**

*Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Program Bedah Rumah, 2017*



**Gambar 4.4 Kondisi Rumah Ibu Siani setelah mendapat bantuan program bedah rumah**

*Sumber: Dokumentasi peneliti, 2018*



**Gambar 4.5 Kondisi Rumah Ibu Siani setelah mendapat bantuan program bedah rumah**

*Sumber: Dokumentasi peneliti, 2018*

Untuk menutupi kekurangan dalam merehab rumah, ada diantara para penerima bantuan program bedah rumah menggunakan tabunganya sendiri untuk menutupi kekuranganya. Namun berbeda dengan Ibu Trikuri yang merupakan salah satu penerima bantuan program bedah rumah di Desa Giripurno Dusun Krajan RT 41 RW 06. Menurut TK (P:49th) yang mengatakan:

“Kalau saya menerima bantuan untuk bedah rumah ini sebesar 33 juta. Alhamdulillah namanya dibantu ya saya terima saja. Dari uang segini sudah bisa memperbaiki atap, dinding. Ya saya terima saja, ini enggak ada pake tabungan saya. Soalnya saya juga enggak kerja. Cuman anak-anak aja yang kerja”. (Wawancara yang dilakukan di Rumah Ibu Trikuri di Dusun Krajan pada tanggal 3 Februari 2018)



**Gambar 4.6 Kondisi Rumah Ibu Trikuri sebelum mendapat bantuan program bedah rumah**

*Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Program Bedah Rumah, 2017*



**Gambar 4.7 Kondisi Rumah Ibu Trikuri setelah mendapat bantuan program bedah rumah**

*Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Program Bedah Rumah, 2017*



**Gambar 4.8 Kondisi Rumah Ibu Siani setelah mendapat bantuan program bedah rumah**

*Sumber: Dokumentasi peneliti, 2018*



Kendala lainya adalah kurangnya perhatian dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu terhadap para panitia program bedah rumah dalam melaksanakan tugasnya, tidak diberikan insentif. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh SP (L:49th) sebagai Panitia program bedah rumah sebagai Bendahara di Dusun Krajan RT 41 RW 06 yang mengatakan:

“Kendalanya ini kita sebagai panitia dengan jangkauan yang cukup banyak. Hal ini lumayan merepotkan. Kita juga gak dibayar. Kami sebagai panita walaupun hanya sebagai relawan yang membantu masyarakat disini, tapi setidaknya ada bantuan agar bisa terselesaikan dengan baik. Minimal ada aparatur desa turun untuk membantu. Tidak hanya mencatat atau mendata saja”. (Wawancara yang dilakukan di Rumah Bapak Supriyadi di Dusun Krajan pada tanggal 3 Februari 2018)

Kendala lainya adalah kepercayaan orang jawa terhadap hari baik dan faktor cuaca. Seperti yang disampaikan oleh TB (L:48th) sebagai Panitia program bedah rumah sebagai Bendahara di Dusun Sawahan RT 12 RW 03 yang mengatakan:

“Ketika musim hujan itu menjadi kendala dalam perehaban rumah. Kendala lainya banyak masyarakat membangun rumah dengan melihat hitungan hari baik. Soalnya disini daerah jawa, masih kental dengan kepercayaan seperti itu”. (Wawancara yang dilakukan di Rumah Bapak Tabri Dusun Sawahan pada tanggal 1 Februari 2018)

Walaupun dalam pelaksanaanya masih ditemukan kendala dalam program bedah rumah, akan tetapi masyarakat penerima bantuan program bedah rumah masih merasakan manfaat dari program tersebut seperti SN (P:52th) di Dusun Sawahan RT 23 RW 03 mengatakan:

“Ya alhamdulillah sudah ada bantuan dari pemerintah jadi bisa kayak gini”. (Wawancara yang dilakukan di Rumah Ibu Siani di Dusun Sawahan pada tanggal 1 Februari 2018)

Senada dengan apa yang disampaikan oleh TK (P:49th) Ibu Trikuri sebagai penerima program bantuan program bedah rumah di Dusun Krajan RT 41 RW 06 mengatakan:

“Program ini cukup membantu mbak, dulu rumah saya kalau hujan sering banjir. Tapi sekarang alhamdulillah udah enggak”. (Wawancara yang dilakukan di Rumah Ibu Trikuri di Dusun Krajan pada tanggal 3 Februari 2018)

Adapun saran yang diberikan oleh para informan mengenai program bedah rumah begitu beraga, adanya saran sebagai bentuk masukan ke depannya agar program bedah rumah dapat diperbaiki dari kekurangan-kekurangan yang ada. Menurut SP (L:49th) sebagai Kasi Kesra Desa Giripurno mengatakan:

“Saya mengharapkan program bedah rumah ini bisa dilanjutkan lagi. Tiap tahun ada. Karena di Desa Giripurno masih banyak masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni”. (Data wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Giripurno pada tanggal 31 Januari 2018)

Senada dengan apa yang disampaikan oleh TB (L:48th) sebagai Bendahara panitia program bedah rumah di Dusun Sawahan RT 12 RW 03 yang mengatakan:

“Kalau bisa dananya bisa ditambah. Karena disini masih banyak yang tidak layak untuk dihuni”. (Wawancara yang dilakukan di Rumah Bapak Tabri Dusun Sawahan pada tanggal 1 Februari 2018)

Peneliti juga melakukan wawancara terkait hal yang sama dengan Panitia program bedah rumah sebagai Bendahara di Dusun Krajan RT 41 RW 06. Menurut SY (L:48th) yang mengatakan:

“Saranya kedepanya, agar program bedah rumah ini dana yang diberikan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dibedah. Soalnya kasian masyarakat seperti ibu trikuri ini tidak bekerja, rumahnya dibedah seperti itu saja sudah syukur. Walaupun lantai belum di keramik setidaknya rumahnya tidak banjir lagi”. (Wawancara yang dilakukan di Rumah Bapak Supriyadi di Dusun Krajan pada tanggal 3 Februari 2018)

Saran lainya untuk pelaksanaan program bedah rumah juga disampaikan oleh Panitia program bedah rumah sebagai Bendahara di Dusun Sawahan RT 12 RW 03 yaitu TB (L:48th) yang mengatakan:

“Dinas Perumahan kedepanya harus bisa menggerakan partisipasi dari desa agar kita sebagai panitia tidak kesulitan dalam menangani program bedah rumah ini. Desa juga harus berperan aktif, karena tanggung jawab sebenarnya harusnya ada di Desa. Selama ini masih kurang. Desa harus benar-benar mengusulkan dan harus koordnasi dengan kita, tidak hanya mencatat saja. Kita harus bisa bekerja sama, bergerak bersama-sama. Ini bukan hanya tugas dari panitia saja. Semua pihak harus terlibat dan bergerak”. (Wawancara yang dilakukan di Rumah Bapak Tabri Dusun Sawahan pada tanggal 1 Februari 2018)

### C. Analisis Data

#### 1. Implementasi program bedah rumah yang masih tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan di Desa Giripurno Kota Batu

Kebijakan publik menurut Fredrich dalam Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam

mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Nugroho (2012:675) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikan kebijakan publik yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Fredrich dan Nugroho maka dapat disimpulkan bahwa program bedah rumah merupakan salah satu dari kebijakan publik karena merupakan serangkaian kegiatan pemerintah untuk merespon, mengidentifikasi dan memecahkan suatu masalah yang ada di dalam masyarakat. Dimana segala tindakan tersebut dituangkan dalam sasaran atau tujuan pemerintah untuk kepentingan publik khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki rumah layak huni.

Implementasi program bedah rumah di Desa Giripurno Kota Batu secara umum telah mencerminkan suatu upaya pemerintah untuk melakukan pengentasan kemiskinan. Namun dalam tahap implementasi masih ditemukan permasalahan. Peneliti mencoba untuk menganalisis implementasi program bedah rumah yang masih tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan di Desa Giripurno Kota Batu dengan menggunakan teori dari Charles O'Jones yakni tiga penilaian dari implementasi program adapun sebagai berikut:

### a. Organisasi

Menurut Jones organisasi berkenaan dengan struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja yang jelas. Dari semua hasil wawancara mengenai aspek organisasi, diketahui bahwa pelaksana program bedah rumah tidak hanya Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu saja, namun melibatkan pihak-pihak seperti Badan Keuangan Daerah bermitra dengan Bank Jatim, aparat Desa atau Kelurahan, dan panitia program bedah rumah yang telah dibentuk di tingkat Desa atau Kelurahan.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa informan terkait pelaksana program bedah rumah, memperlihatkan bahwa pelaksanaan program bedah rumah di Desa Giripurno Kota Batu belum semua pihak terlibat. Di Desa Giripurno Kota Batu hanya panitia program bedah rumah yang menjadi pelaksana dalam program bedah rumah. Aparatur desa hanya melakukan pendataan kepada masyarakat. Sedangkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan hanya ada saat melakukan verifikasi di lapangan apakah rumah tersebut layak untuk di bedah. Artinya tidak semua pihak-pihak yang terkait mau berkerja sama untuk turun langsung membantu pelaksanaan program bedah rumah. Sehingga masih banyak rumah yang divedah tetapi kondisinya masih tidak baik atau masih tidak layak untuk di huni.

Bila dikaitkan dengan pendapat Hogwood dan Gunn dalam Winarno (2012:102) yang membagi pengertian kegagalan kebijakan (policy failure) kedalam dua kategori, yaitu:



- a. *Non Implementation*, yang artinya bahwa suatu kebijaksanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana. Hal ini terjadi karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, berkerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan yang terjadi.
- b. *Unsuccessful Implemntation*, yang artinya suatu kebijaksanaan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan kebijaksanaan tersebut, tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijaksanaan yang memiliki resiko untuk gagal tersebut disebabkan faktor-faktor pelaksanaannya yang jelek (*bad execution*), kebijaksanaan yang jelek (*bad policy*) dan kebijakan itu bernasib jelek (*bad luck*).

Maka kegagalan kebijakan program bedah rumah di Desa Giripurno Kota Batu masuk kedalam kategori *Unsuccessful Implemntation*. Peneliti melihat bahwa program bedah rumah sudah berjalan namun tidak sesuai dengan rencana. Masih banyak pihak-pihak yang menjadi pelaksana tidak menjalankan tugasnya dengan maksimal. Akibatnya pelaksanaannya menjadi jelek atau *bad execution*.

Jika dilihat dari jumlah pelaksana program bedah rumah ini sebanyak tiga orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Namun saat dilakukan konfirmasi kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak mengetahui secara pasti, hanya menyebutkan pihak-pihak yang menjadi pelaksana program bedah rumah. Peneliti menganalisis bahwa jika banyak pihak yang terlibat

menjadi pelaksana dalam program bedah rumah, maka jumlah pelaksana juga banyak.

Banyak atau sedikitnya pelaksana yang terlibat dalam program bedah rumah, tidak menjamin untuk memberikan pengaruh besar terhadap suksesnya pelaksanaann program, yang paling penting adalah para pelaksana tersebut memiliki kemampuan, karena setiap program tidak hanya diukur dari segi kuantitas atau jumlah. Faktor yang menentukan baik atau buruknya suatu program juga bisa dilihat dari kualitas atau kemampuan yang dimiliki oleh pelaksana program. Ketika kemampuan pelaksana program baik, maka program tersebut akan menjadi baik.

Selanjutnya kemampuan dari pelaksana program bedah rumah di Desa Giripurno Kota Batu. Berdasarkan hasil wawancara dan obsevarsi peneliti bahwa kemampuan dari pelaksana program bedah rumah sudah baik. Kemampuan pelaksana tidak hanya dilihat dari pendataan rumah yang ingin mendapat bantuan program bedah rumah, verifikasi maupun pada saat membantu penerima dalam proses pendaftaran. Akan tetapi pelaksana program bedah rumah juga harus bisa menguasai komputer. Namun kemampuan pelaksana dari pihak lain seperti perangkat desa maupun dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan belum terlihat. Hal ini dikarenakan karena mereka tidak membantu panitia program bedah rumah dalam pelaksanaa program tersebut, sehingga panitia program bedah rumah mengalami kesulitan ketika di lapangan.

Selain itu perlengkapan atau alat-alat kerja yang jelas juga mendukung bagi kelancaran suatu program bedah rumah. Perlengkapan yang digunakan dalam

program bedah rumah adalah persyaratan-persyaratan yang dapat diajukan untuk mendapat bantuan program bedah rumah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti melihat bahwa persyaratan yang ada pada program bedah rumah sejauh ini mempermudah para pendaftar untuk mengikuti program bedah rumah. Karena persyaratan yang harus dilengkapi tidak terlalu banyak seperti fotocopy KTP, Kartu Keluarga (KK), surat keterangan tidak mampu (asli), surat keputusan kepanitian bedah rumah, membuar rinciangan anggaran belanja (RAB), foto fisik rumah yang dibedah, bukti kepemilikan tanah. Persyaratan yang diberikan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terkait kepada para calon pendaftar yang diperuntukkan untuk para pendaftar yang tidak memiliki rumah layak huni.

#### **b. Interpretasi**

Interpretasi berkenaan dengan para pelaksana kebijakan atau orang-orang yang ada di dalam organisasi yang bertanggung jawab dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada aspek interpretasi dalam pelaksanaan program bedah rumah bahwa orang-orang yang bertanggung jawab adalah pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program tersebut. Dimana pihak-pihak yang langsung terkait dalam program bedah rumah dan langsung turun ke lapangan adalah Dinas Perumahan dan panitia program bedah rumah yang ada di tingkat desa atau kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa di Desa Giripurno yang bertanggung jawab adalah panitia program bedah rumah. Desa atau kelurahan hanya sebagai pengawas untuk memantau pekerjaan di lapangan sudah sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB), mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan yang menghambat pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan program bedah rumah yang tidak dapat dilaksanakan. Sejauh ini kinerja dari panitia program bedah rumah sudah berjalan dengan baik.

Pelaksanaan program bedah rumah dapat berjalan lancar apabila kinerja dari orang-orang yang bertanggung jawab dalam program bedah rumah tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini akan memberikan dampak positif pada pelaksana program tersebut. Namun apabila orang-orang yang bertanggung jawab tidak menjalankan dengan baik, maka akan memberikan dampak negatif terhadap program bedah rumah. Maka dari itu, peneliti mencoba untuk mencari informasi terkait kinerja dari pelaksana atau orang-orang yang menjalankan program bedah rumah di Desa Giripurno.

Peneliti melihat bahwa Kinerja dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ketika pelaksanaan program bedah rumah di Desa Giripurno Kota Batu juga belum optimal. Dimana masih kurang membantu panitia program bedah rumah ketika pelaksanaan program bedah rumah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan turun ke lapangan hanya pada saat survei. hal ini yang membuat pelaksana yaitu panitia program bedah rumah sedikit kesulitan dalam melaksanakan program bedah rumah. Sedangkan panitia program bedah rumah di

Desa Giripurno sebagai pelaksana yang ada di lapangan sudah cukup bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program bedah rumah.

Selain itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan belum bisa menggarakan pihak desa untuk membantu pelaksanaan program bedah rumah, seperti yang dirasakan di Desa Giripurno Kota Batu. Oleh karena itu peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sangat diperlukan untuk menggerakkan partisipasi dari pihak yang terkait agar pelaksanaan program bedah rumah dapat berjalan dengan baik. Tidak hanya itu saja, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan perlu meningkatkan kembali anggaran untuk bantuan program bedah rumah kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang tidak memiliki rumah yang layak untuk di huni.

Untuk mendukung kinerja dari pelaksana maupun Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu, maka sangat diperlukan koordinasi yang terjalin di antara pihak terkait demi kelancaran program bedah rumah. Koordinasi sangat penting dilakukan, hal ini berguna untuk menciptakan hubungan yang harmonis di antara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program bedah rumah. Selain itu koordinasi juga dibutuhkan untuk menyamakan persepsi agar tidak muncul kesalahpahaman dan pelaksanaan program bedah rumah bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Koordinasi yang dilakukan cukup baik dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu dengan desa atau kelurahan, panitia program bedah rumah dan Badan Keuangan Daerah berjalan baik. Koordinasi pun



selalu dilakukan antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan pihak Desa Giripurno, begitu pun sebaliknya. Maka sangat penting untuk melakukan koordinasi agar pelaksanaan program bedah rumah dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Khususnya bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan memiliki rumah yang tidak layak untuk dihuni.

Keberadaan program bedah rumah di Desa Giripurno Kota Batu pada dasarnya membantu masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah yang layak untuk di huni, yang mana membantu mengatasi masalah kemiskinan di Desa tersebut. Namun dalam proses perehaban rumah, penerima bantuan program bedah rumah tersebut menggunakan tukang untuk merehab rumahnya, hal ini menjadi kendala karena biaya untuk tukang tidak boleh dianggarkan dan penerima bantuan program bedah rumah harus menggunakan uangnya sendiri untuk membayar tukang. Di sisi lain penerima bantuan program bedah rumah merasa terbantu dengan adanya gotong royong dari masyarakat dengan senang hati membantu untuk merehab rumahnya.

Di sisi lain dalam pelaksanaannya, sudah terlihat rasa gotong royong dan kesetiakawanan dari masyarakat yang membantu merehab rumah dari penerima program bedah rumah. Masyarakat di Desa Giripurno respek terhadap program bedah rumah. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa esensi dari pelaksanaan program bedah rumah adalah menumbuhkan kembali rasa gotong royong dan kesetiakawanan sosial yang mulai pudar di tengah masyarakat.

### c. Penerapan

Penerapan berkenaan dengan peraturan atau kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat ini harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada aspek penerapan bahwa penerapa program bedah rumah belum sepenuhnya belum berjalan secara optimal.

Program bedah rumah di Kota Batu mengacu pada Peraturan Walikota Batu Nomor 42 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemberian Dana Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni, dimana dalam perwali tersebut dijelaskan tujuan, sasaran, kriteria rumah yang ingin di bedah, mekanisme mendapatkan bantuan program bedah rumah pihak-pihak yang terlibat dari pelaksana sampai dengan pengawasan dan pertanggung jawaban. Adapun mekanisme atau prosedur dalam pemberian dana bantuan program bedah rumah adalah sebagai berikut:



**Gambar 4.9 Alur Prosedur Pemberian Dana Bantuan Bedah Rumah**

*Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018*

Peneliti melihat bawah persyaratan yang ada pada program bedah rumah sejauh ini mempermudah para pendaftar untuk mengikuti program bedah rumah. Karena persyaratan yang harus dilengkapi tidak terlalu banyak seperti proposal pengajuan program bedah rumah beserta data-data yang harus dilengkapi seperti fotocopy KTP, Kartu Keluarga (KK), surat keterangan tidak mampu (asli), surat keputusan kepanitian bedah rumah, membuar rinciangan anggaran belanja (RAB), foto fisik rumah yang dibedah, bukti kepemilikan tanah.

Peneliti melihat bahwa program bedah rumah perlu dilanjutkan. Agar program ini tetap berlanjut, maka yang diperlukan adalah bantuan dana yang bersumber dari APBD Kota Batu. Harapanya, tahun berikutnya program bedah rumah tetap ada dan terus berlanjut dengan dana yang tidak hanya dari APBD Kota

Batu tetapi dari dana yang bersumber dari masyarakat, swasta, maupun hibah. Hal ini perlu dilakukan mengingat masih banyak masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah yang layak huni, belum mendapatkan bantuan tersebut. Sehingga perlu dibantu agar mereka memiliki rumah layak huni.

Terkait sasaran program dari bedah rumah di Desa Giripurno Kota Batu sejauh ini sudah tepat. Artinya bantuan tersebut sudah tepat diberikan kepada masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni. Dengan begitu, maka membantu Pemerintah Kota Batu mengurangi angka kemiskiskinan, khususnya masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni. Perangkat desa juga ikut terlibat dalam penentuan penerima program bedah rumah.

Mengacu pada penyajian data, dapat diketahui bahwa bahwa terdapat SOP yaitu Peraturan Walikota Batu Nomor 42 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemberian Dana Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni. Selain itu bantuan yang digunakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berupa bantuan dana. Dana ditentukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan setelah melakukan survei di lapangan. Anggaran yang diberikan sebesar Rp. 15.000.000,- sampai dengan Rp. 35.000.000,-. Dana tersebut berasal dari APBD Kota Batu.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti, dapat diketahui perlu adanya perhatian dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu. Perhatian tersebut adalah adanya upah untuk tenaga kerja di dalam Rancangan Anggaran Belanja dan panitia program bedah rumah. Karena selama ini

tenaga kerja atau buruh dibiayai oleh penerima bantuan program bedah rumah. Selain itu peneliti melihat bahwa terkadang panitia program bedah rumah berkorban untuk membantu penerima bantuan program tersebut dengan mengeluarkan tenaga, pikiran, bahkan uang.

Selain itu terkait dengan dana bantuan program bedah rumah, peneliti melihat bahwa perlu adanya penambahan. Dikarenakan masih banyak masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni yang harus dibantu. Seperti di Desa Giripurno Kota Batu, dimana masih banyak masyarakat yang harus dibantu.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu belum maksimal. Sosilasaki dilakukan hanya saat agenda Musyawarah Desa (Musdes), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan dan Musrenbang Kota. Tidak terdapat jadwal khusus untuk melakukan sosialisasi pada setiap desa atau kelurahan.

Selain itu ketetapan dari nominal bantuan yang diberikan kepada masyarakat menurut beberapa informan yang peneliti wawancarai dinilai belum tepat. Nominal yang diberikan terkadang masih kurang untuk merehab rumah. Sehingga beberapa penerima bantuan program bedah rumah menggunakan tabunganya sendiri atau bekerja terlebih dahulu untuk menutupi kekuranganya. Hal ini seperti yang dirasakan oleh penerima bantuan program bedah rumah di Desa Giripurno yakni Ibu Siani di Dusun Sawahan RT 23 RW 03.

Saat pelaksanaan program bedah rumah, tidak dapat diketahui jadwal yang tepat dalam pelaksanaan program bedah rumah. Pemerintah memberikan patokan



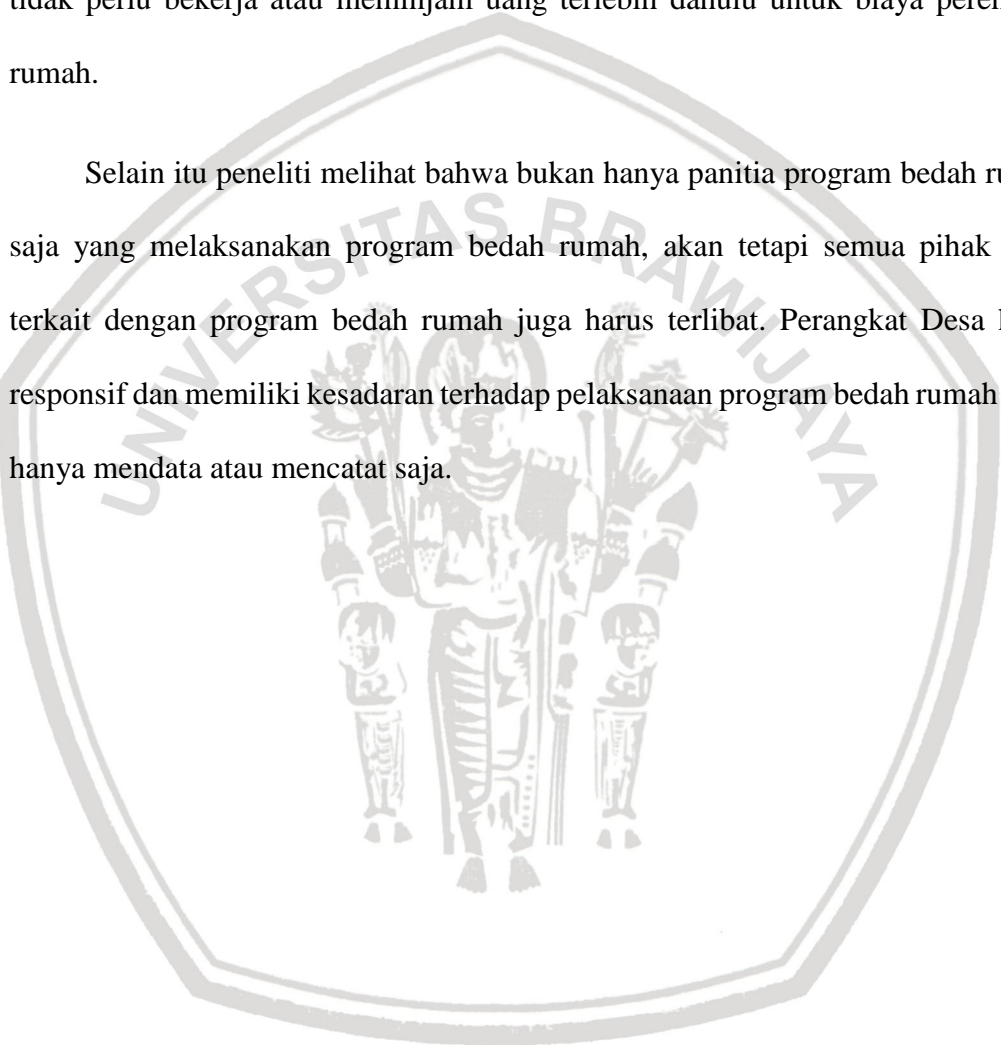
kepada panitia program bedah rumah Bulan Desember tahun anggaran berjalan sudah selesai dilaksanakan. Hal ini juga di dukung di dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 42 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemberian Dana Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni, dimana dalam Perwali tersebut tidak dijelaskan, hanya dijelaskan selururuh pertanggung jawaban pelaksanaan diselesaikan paling lama 15 hari setelah kegiatan bedah rumah selesai. Selain itu Peneliti melihat bahwa dalam prosedur pelaksanaan program bedah rumah, proses pencairan dana tidak memiliki kepastian waktu yang jelas. Dilihat dari petunjuk teknis pelaksanaanya, tidak ada standar waktu dalam hal pencairan dana. Adanya ketidakpastian dan keterlamabatan dalam proses pencairan dana, juga berpengaruh terhadap jadwal perehaban rumah penerima bantuan. Dimana jadwal perehaban rumah menjadi tidak jelas.

Suatu program yang telah terlaksana, pada umumnya selalu ada kendala-kendala ketika pelaksanaanya di lapangan. Tidak terkecuali program bedah rumah di Desa Giripurno Kota Batu. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, masih ditemukan kendala dalam pelaksaannya program bedah rumah. Salah satunya adalah mengenai dana. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa dana yang dianggarkan oleh Pemerintah sebesar Rp. 15.000.000,- sampai dengan 35.000.000,- dinilai tidak cukup untuk perehaban rumah. Seperti yang dirasakan oleh Ibu Siani dan Ibu Trikuri.

Berdasarkan hasil wawancara yang ada di penyajian data, dapat diketahui bawah pihak Kasi Kesra Desa Giripurno dan panitia program bedah rumah di Desa Giripurno Dusun Sawahan mengharapkan program bedah rumah bisa terus

dilanjutkan. Hal ini dikarenakan masih banyak rumah tidak layak huni di Desa Giripurno yang harus dibantu. Bantuan program bedah rumah yang diberikan kepada penerima juga harus sesuai dengan kebutuhan dimana bantuan tersebut cukup untuk digunakan dalam proses perehaban rumah, sehingga para penerima tidak perlu bekerja atau meminjam uang terlebih dahulu untuk biaya perehaban rumah.

Selain itu peneliti melihat bahwa bukan hanya panitia program bedah rumah saja yang melaksanakan program bedah rumah, akan tetapi semua pihak yang terkait dengan program bedah rumah juga harus terlibat. Perangkat Desa harus responsif dan memiliki kesadaran terhadap pelaksanaan program bedah rumah tidak hanya mendata atau mencatat saja.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan yang peneliti lakukan di lapangan, maka penyimpulan akhirnya adalah bahwa implementasi program bedah rumah di Desa Giripurno Kota Batu secara umum telah mencerminkan suatu upaya pemerintah untuk melakukan pengentasan kemiskinan. Namun pada tahap implementasinya kurang berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan:

1. Pada aspek organisasi, belum sepenuhnya keterlibatan pihak-pihak terkait dengan program bedah rumah menjadi pelaksana, pelaksana di lapangan di serahkan kepada panitia program bedah rumah yang sudah di bentuk pada tingkat desa atau kelurahan.
2. Pada aspek interpretasi, yang bertanggung jawab terhadap program bedah rumah adalah pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program tersebut dimana pihak-pihak yang langsung terkait dalam program bedah rumah dan langsung turun ke lapangan adalah Dinas Perumahan dan panitia program bedah rumah yang ada di tingkat desa atau kelurahan. Kinerja dari panitia program bedah rumah di Desa Giripurno cukup baik dalam melaksanakan tugasnya, namun kinerja dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ketika

pelaksanaan program bedah rumah di Desa Giripurno Kota Batu juga belum optimal. Dimana masih kurang membantu panitia program bedah rumah ketika pelaksanaan program bedah rumah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan turun ke lapangan pada saat survei saja. ini yang membuat pelaksana sedikit kesulitan dalam melaksanakan program bedah rumah. Selain pengawasan dari Desa juga belum maksimal.

3. Pada aspek penerapan, ketetapan dari nominal bantuan yang diberikan kepada masyarakat menurut beberapa informan yang peneliti wawancarai dinilai belum tepat, maksudnya nominal yang diberikan terkadang masih kurang untuk merehab rumah, sehingga masih banyak rumah yang sudah dibedah namun kondisinya masih kurang baik. Kendala lainya adalah dalam perehaban rumah masih menggunakan hari baik (adat jawa), hal ini mengakibatkan pelaksanaan perehaban rumah molor.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan agar pelaksanaan program bedah rumah di Desa Giripurno Kota Batu dapat berjalan optimal. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pada aspek organisasi saran yang diberikan adalah meningkatkan koordinasi, kerjasama dan rasa tanggung jawab antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan pihak yang terkait dalam program bedah rumah seperti Perangkat Desa, RT/RW dan panitia program bedah rumah dalam melaksanakan program bedah rumah. Cara yang dilakukan bisa dengan pendekatan persuasif dan memberikan pengarahan secara terus menerus oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kepada pihak-pihak yang terkait dengan program tersebut.
2. Pada aspek interpretasi saran yang diberikan adalah perlu adanya perhatian dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu kepada panitia program bedah rumah dengan memberikan insentif berupa upah yang cukup bagi panitia program bedah rumah, karena peneliti melihat bahwa panitia program bedah rumah berkorban untuk membantu penerima bantuan program bedah rumah dengan mengeluarkan tenaga, pikiran bahkan uang. Selain itu perlu menjadi pertimbangan terhadap biaya tenaga kerja (tukang) dianggarkan di dalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB).

Pada aspek penerapan saran yang diberikan adalah perlu dicantumkan jadwal penyeleksian dan proses pencairan dana dalam prosedur program bedah rumah. Selain itu perlu peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan program bedah rumah baik di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Desa atau



Kelurahan, panitia program bedah rumah maupun para penerima bantuan program bedah rumah. Cara yang bisa dilakukan dengan memberikan sosialisasi atau pelatihan kepada masyarakat, perangkat desa dan panitia agar memahami terkait program bedah rumah. Hal ini perlu dilakukan agar tujuan dari adanya program bedah rumah bisa tercapai.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Agustino, L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Andersom, James E. 1979. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara.
- Badudu J. S dan Zain, Sultan Mohammad. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bungin, Burhan. 2010. *Peneliti Kualitatif. Cetakan keempat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Denscombe, Martyn. 2007. *The Good Research Guide:for small-scale Social Research Project*. Third Edition. New York Press:Pustaka Pelajar.
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, C.O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Keban, Y. 2008. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik (Konsep Teori dan Isu)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- M, Suparno Sastra. 2006. *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*. Yogyakarta: Andi, c2006
- Maipita, Indra. 2014. *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. UPP Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mansyur. 2010. *Manajemen Pembiayaan Proyek*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- \_\_\_\_\_. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- \_\_\_\_\_. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- \_\_\_\_\_. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mukherjee, N dan Carriere, Elisabeth 2002. *Masyarakat, Kemiskinan dan Mata Pencarian (Mata Rantai Pengurangan Kemiskinan Di Indonesia)*. Jakarta: The World Bank
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Nugroho. 1995. *Kepemimpinan Mutu*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo
- Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Utama.
- Pasalong, Harbani. 2011. *Pengertian Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Safrony, H.M Ladzi. 2012. *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi di Indonesia (Teori, Kebijakan dan Implementasi)*. Malang: Aditya Media Publishing.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia (Menggagas Model Jaminan Sosial di Universal Bidang Kesehatan)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodinigrat, Gunawan. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Supriatna, T. 1997. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora Utama.
- Suryawati. 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: YKPN.
- Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Suyanto, Bagong. 2013. *Anatomi kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang: Intrans Publishing University Press.
- Tantoro, Swiss. 2014. *Pembasmian Kemiskinan : Perspektif Sosiologi-Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tjokroamidjojo, Bintaro. 1990. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung.

- Wahab, Solichun Abdul Wahad. 2015. *Analisis Kebijakan (Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Winarno. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus Edisi & Revisi Terbaru*. Yogyakarta: CAPS.

**Dokumen:**

Kota Batu dalam Angka 2017

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kota Batu tahun 2016

Peraturan Walikota Batu Nomor 42 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemberian Dana Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni.

Profil Desa Giripurno Kota Batu

Rencana Strategis Direktorat Rumah Khusus Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

**Jurnal:**

- Trikomara, R, Sebayang, M, dan Putri, M.E. 2007. *Analisis Kebutuhan Rumah Layak Huni di Kelurahan Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu*. Repository Unri, 2.1-12

**Skripsi:**

- Arhohim, Arif. *Evaluasi Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RLTH) Studi Kecamatan Sukun Kota Malang*. Universitas Brawijaya: Skripsi yang dipublikasikan.
- Nugraha, Adi Fajar. 2014. *Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Kota Serang*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa: Skripsi yang dipublikasikan.

**Tesis:**

Nurasrizal. 2010. *Pertumbuhan Rumah Inti pada Perumahan Layak Huni bagi Keluarga Miskin di Dusun Kayu Gadang Kota Sawahlunto*. Universitas Diponegoro: Tesis yang dipublikasikan

**Internet :**

[www.malangvoice.com](http://www.malangvoice.com) diakses pada 29 September 2017

[www.bangsaonline.com](http://www.bangsaonline.com) diakses pada 29 September 2017





### Lampiran 1. Dokumentasi Peneliti Selama Penelitian



**Wawancara dengan Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu**



**Wawancara dengan Kasi Kesra Desa Giripurno**



**Wawancara dengan panitia program bedah rumah di Dusun Sawahan  
RT 12 RW 03**



**Wawancara dengan panitia program bedah rumah sebagai  
Bendahara di Dusun Krajan RT 41 RW 06**



**Wawancara dengan Ibu Siani di Dusun Sawahan RT 23 RW 03 sebagai penerima bantuan program bedah rumah**



**Wawancara dengan Ibu Trikuri di Dusun Krajan RT 41 RW 06 sebagai penerima bantuan program bedah rumah**



## Lampiran 2. Pedoman Wawancara

### Pedoman Wawancara

#### 1. Dinas Perumahan Kota Batu

- a. Bagaimana implementasi program bedah rumah di kota batu?
- b. Apakah tidak ada kendala dalam pelaksanaannya?
- c. Apa peran atau tugas dinas perumahan dalam program bedah rumah?
- d. Bagaimana koordinasi yang dilakukan pihak tim teknis dalam pelaksanaan program bedah rumah?
- e. Bagaimana tata cara atau prosedur pengajuan program bedah rumah?
- f. Siapa pihak yang melakukan sosialisasi?
- g. Apakah masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui program bedah rumah ini?
- h. Bagaimana prosedur atau penyaluran dana?
- i. Bagaimana peran pemerintah? Apakah pemerintah juga ikut aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan program bedah rumah?
- j. Menurut bapak bagaimana program bedah rumah ini? Apakah sudah memberikan dampak yang baik?
- k. Apakah ada yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaannya?
- l. Bagaimana koordinasi yang dilakukan dinas perumahan dengan kelurahan, panitia, dll?

#### 2. Perangkat Desa Giripurno Kota Batu

- a. Apa peran dari perangkat Desa dalam implementasi program bedah rumah?
- b. Apakah untuk mengajukan bantuan program bedah rumah harus melewati Desa Giripurno?
- c. Berapa jumlah rumah tidak layak huni di Desa Giripurno yang mendapat bantuan program bedah rumah?

- d. Siapa saja yang bertanggung jawab terhadap program bedah rumah?
- e. Bagaimana kinerja pelaksana/orang yang melaksana program bedah rumah?
- f. Bagaimana koordinasi yang terjalin antara Dinas/Instansi terkait dengan pelaksana dalam program bedah rumah?
- g. Bagaimana pendapat anda mengenai program bedah rumah saat ini?

### 3. Panitia program bedah rumah

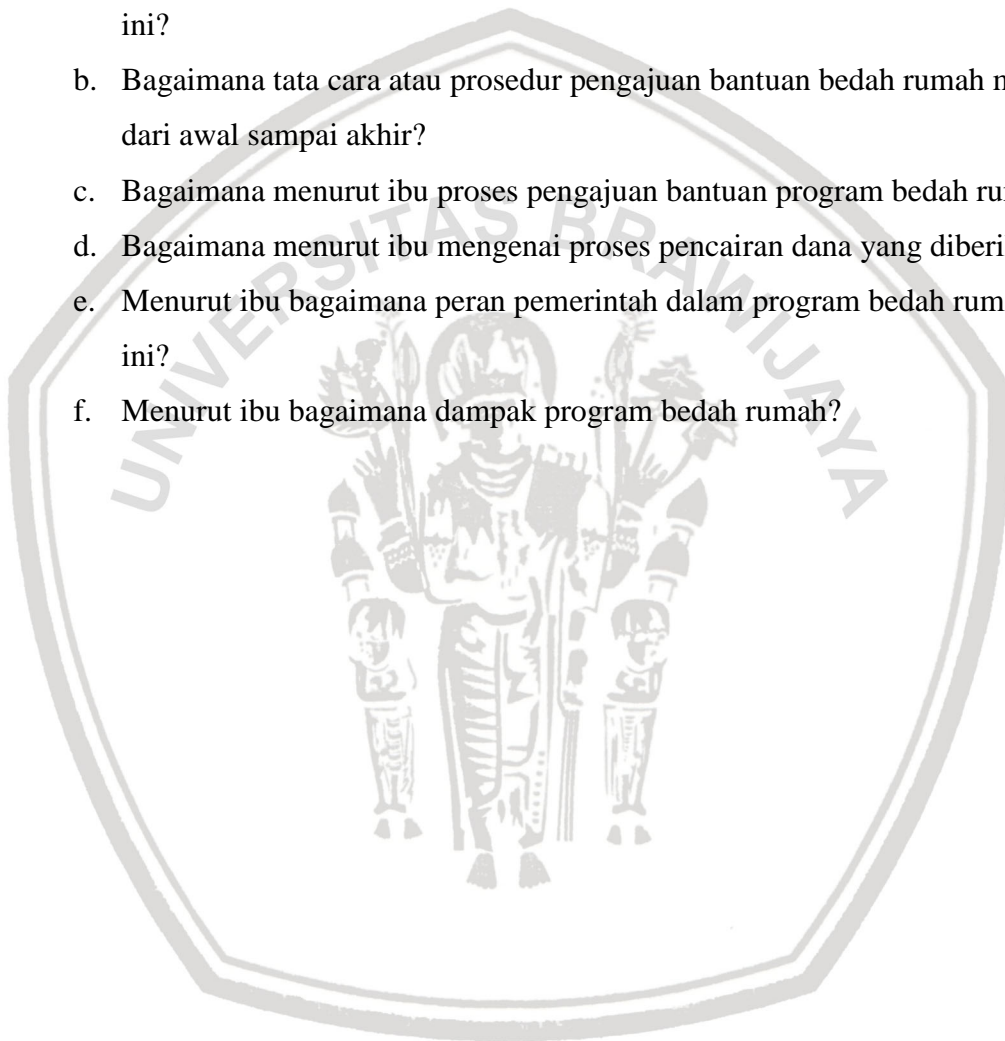
- a. Bagaimana struktur pelaksana program bedah rumah?
- b. Siapa saja yang menjadi pelaksana dalam program bedah rumah?
- c. Berapakah jumlah pelaksana dalam program bedah rumah?
- d. Bagaimana kemampuan pelaksana dalam program bedah rumah?
- e. Apa saja perlengkapan yang dipersiapkan dalam program bedah rumah?
- f. Bagaimana kelengkapan dari perlengkapan program tersebut?
- g. Siapa saja yang bertanggung jawab terhadap program bedah rumah?
- h. Bagaimana kinerja pelaksana/orang yang melaksana program bedah rumah?
- i. Bagaimana kinerja Dinas/Instansi terkait selaku pengelola program bedah rumah?
- j. Bagaimana koordinasi yang terjalin antara Dinas/Instansi terkait dengan pelaksana dalam program bedah rumah?
- k. Bagaimana pendapat anda mengenai program bedah rumah saat ini?
- l. Apakah pelaksanaan program bedah rumah sesuai dengan perencanaan awal yang telah ditetapkan?
- m. Bagaimana ketepatan dari sasaran program bedah rumah?
- n. Bagaimana prosedur yang ada pada program bedah rumah ini?
- o. Bagaimana kesesuaian antara prosedur yang telah ditetapkan dengan pelaksana di lapangan?
- p. Apa saja yang menjadi hambatan/kendala dari program bedah rumah?
- q. Manfaat apa yang dirasakan dengan adanya program bedah rumah?



- r. Saran apa yang anda berikan untuk pelaksana program bedah rumah selanjutnya?

**3. Kelompok Penerima Bantuan Program Bedah Rumah?**

- a. Apa peran panitia program bedah rumah dalam implementasi program ini?
- b. Bagaimana tata cara atau prosedur pengajuan bantuan bedah rumah mulai dari awal sampai akhir?
- c. Bagaimana menurut ibu proses pengajuan bantuan program bedah rumah?
- d. Bagaimana menurut ibu mengenai proses pencairan dana yang diberikan?
- e. Menurut ibu bagaimana peran pemerintah dalam program bedah rumah ini?
- f. Menurut ibu bagaimana dampak program bedah rumah?



## Lampiran 3. Perwali mengenai Program Bedah Rumah

**DRAFT****PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA BATU****NOMOR 1 TAHUN 2017****TENTANG****SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN DANA BANTUAN BEDAH  
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA BATU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dana Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Desa/Kelurahan, perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Pemberian Dana Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni sebagai acuan bagi Desa/Kelurahan dan Tim Verifikasi Pemerintah Kota Batu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Sistem dan Prosedur Pemberian Dana Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu;
20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Walikota Batu Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

Halaman 3 dari 12 hlm....

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN  
PROSEDUR PENCAIRAN DANA BANTUAN BEDAH  
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Batu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Lembaga Teknis, dan Kecamatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batu.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Batu sebagai unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.



9. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemerintah Kota Batu.
10. Kepala Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Batu.
11. Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah atau tempat tinggal yang tidak memenuhi standar dan kriteria kesehatan bagi penghuninya.
12. Bedah Rumah adalah perbaikan rumah yang merupakan tindakan oleh Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dan/atau memiliki tempat hunian yang tidak layak.
13. Penerima Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni adalah panitia badan rumah yang menangani bedah rumah 1 (satu) rumah atau lebih yang berada di wilayah Kota Batu.

## **BAB II**

### **TUJUAN, ASAS, DAN KRITERIA SASARAN**

#### **Pasal 2**

Pelaksanaan kegiatan bedah rumah tidak layak huni bertujuan:

- a. mensejajarkan taraf hidup dan rumah layak huni;
- b. menciptakan lingkungan bersih dan sehat;
- c. menciptakan lingkungan yang rapi dan teratur; dan
- d. memberdayakan peran serta masyarakat terhadap pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **Pasal 3**

Pelaksanaan kegiatan bedah rumah tidak layak huni berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan: dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang;

Halaman 5 dari 12 hlm....

- b. keadilan: menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban;
- c. kemanfaatan: dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi yang diperbaiki atau diganti;
- d. keterpaduan: mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis;
- e. kemitraan: dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penerima bantuan bedah rumah dan masyarakat pada umumnya dibutuhkan kemitraan dengan berbagai pihak;
- f. keterbukaan: pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini berhak mendapatkan informasi yang besar dan bersedia menerima masukan bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan bedah rumah;
- g. akuntabilitas: berbagai sumber daya digunakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif;
- h. partisipasi: pelaksanaan kegiatan bedah rumah dilaksanakan dengan melibatkan unsur masyarakat termasuk dunia usaha dengan mendayagunakan berbagai sumberdaya yang dimiliki;
- i. profesional: dilaksanakan dengan menggunakan manajemen yang baik dan pendekatan/konsep yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; dan
- j. keberlanjutan: dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

#### **Pasal 4**

Kriteria sasaran untuk bedah rumah tidak layak huni diberikan kepada warga dengan kriteria sebagai berikut:

- a. tanah milik sendiri;
- b. dinding rumah umumnya terbuat dari bambu/papan/bahan yang mudah rusak;
- c. lantai tanah dan/atau ubin/plester kasar;

- d. diutamakan tidak memiliki fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK);
- e. diutamakan atap yang terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk; dan
- f. Lokasi rumah tidak berada atau diatas sepadan jalan dan sungai.

### **BAB III**

#### **PERSYARATAN BEDAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI**

##### **Pasal 5**

Persyaratan pencairan dana bedah rumah tidak layak huni harus menyertakan dokumen dan persyaratan sebagai berikut:

- a. surat permohonan (mengetahui desa/kelurahan);
- b. fotocopy KTP;
- c. fotocopy kartu keluarga;
- d. surat keterangan tidak mampu (asli);
- e. surat keputusan kepanitian bedah rumah;
- f. rincian anggaran belanja;
- g. foto fisik rumah yang dibedah;
- h. bukti kepemilikan tanah/keterangan dari desa/kelurahan; dan
- i. berpenduduk Kota Batu paling sedikit 2 (dua) tahun.

### **BAB IV**

#### **PENGELOLAAN BANTUAN BEDAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Mekanisme Pengajuan**

##### **Pasal 6**

Mekanisme pengajuan bantuan bedah rumah tidak layak huni sebagai berikut:

- a. desa/kelurahan membentuk panitia bedah rumah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dengan tugas:

Halaman 7 dari 12 hlm....

1. mengelola dan memverifikasi warga yang berhak menerima bantuan;
  2. membuat surat keputusan penetapan rumah yang akan diajukan (Keputusan Kepala Desa/Lurah);
  3. membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan gambar sederhana
  4. melampirkan foto/dokumentasi rumah yang diberi bantuan;
  5. membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan (mulai sejak dana diterima) paling lama 1-2 minggu sejak dana diterima; dan
  6. melaksanakan pekerjaan secara kerja bakti/gotong royong.
- b. kepala desa/lurah mengajukan permohonan kepada Walikota cq. Badan Keuangan Daerah atau Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan, RAB (Rancangan Anggaran Biaya), gambar atau dokumentasi dan lain-lain yang diperlukan.
- c. Berdasarkan usulan dari Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Penetapan Penerima Bedah Rumah dan Penetapan Panitia Bedah Rumah yang telah disampaikan ke Badan Keuangan Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemberian Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni
- d. Keputusan Walikota yang telah diterbitkan harus didukung berkas pengajuan/proporsal dari masing-masing Desa/Kelurahan atau Panitia pada masing-masing Desa/Kelurahan diserahkan ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk dilaksanakan fisik rumah yang akan dibedah;
- e. Pembahasan dalam Tim untuk diverifikasi harus sesuai kriteria, maksud, dan tujuan pemberian bantuan dana bedah rumah tidak layak huni tersebut terutama dari segi aspek sosial, kesehatan, dan kelayakan tempat tinggal bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan;



- f. Jika sudah selesai baik secara administrasi oleh Badan Keuangan Daerah dan kondisi fisik bangunan di lapangan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka dibuat Berita Acara hasil verifikasi dan selanjutnya dibuatkan Rekomendasi Tim Verifikasi Pemerintah Kota Batu; dan
- g. Rekomendasi yang terbit sebagai dasar untuk proses administrasi pencairan dana bantuan bedah Rumah Tidak Layak Huni ke Badan Keuangan Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Besarnya Dana Bantuan**

**Pasal 7**

Masing-masing rumah mendapat dana bantuan bedah rumah tidak layak huni paling sedikit Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang disesuaikan dengan kualitas dan volume bangunan.

**Bagian Ketiga**  
**Pencairan Dana Bantuan Bedah Rumah**  
**Tidak Layak Huni**

**Pasal 8**

Pencairan dana bantuan bedah rumah tidak layak huni harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dana tidak diserahkan tunai kepada pemilik rumah;
- b. dana dikelola oleh panitia yang dibentuk oleh kepala desa/lurah;
- c. kwitansi tanda bukti terima uang bantuan bedah rumah tidak layak huni ditandatangani oleh panitia; dan
- d. hasil pekerjaan panitia bedah rumah tidak layak huni diserahkan kepada pemilik rumah tidak layak huni;



- f. Jika sudah selesai baik secara administrasi oleh Badan Keuangan Daerah dan kondisi fisik bangunan di lapangan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka dibuat Berita Acara hasil verifikasi dan selanjutnya dibuatkan Rekomendasi Tim Verifikasi Pemerintah Kota Batu; dan
- g. Rekomendasi yang terbit sebagai dasar untuk proses administrasi pencairan dana bantuan bedah Rumah Tidak Layak Huni ke Badan Keuangan Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Besarnya Dana Bantuan**

**Pasal 7**

Masing-masing rumah mendapat dana bantuan bedah rumah tidak layak huni paling sedikit Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang disesuaikan dengan kualitas dan volume bangunan.

**Bagian Ketiga**  
**Pencairan Dana Bantuan Bedah Rumah**  
**Tidak Layak Huni**

**Pasal 8**

Pencairan dana bantuan bedah rumah tidak layak huni harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dana tidak diserahkan tunai kepada pemilik rumah;
- b. dana dikelola oleh panitia yang dibentuk oleh kepala desa/lurah;
- c. kwitansi tanda bukti terima uang bantuan bedah rumah tidak layak huni ditandatangani oleh panitia; dan
- d. hasil pekerjaan panitia bedah rumah tidak layak huni diserahkan kepada pemilik rumah tidak layak huni;

#### **Bagian Keempat Pertanggung jawaban**

##### **Pasal 9**

- (1) Panitia bedah rumah tingkat desa/kelurahan bertanggung jawab untuk melaporkan penggunaan dana bantuan bedah rumah tersebut.
- (2) Pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan dibuat dengan melampirkan bukti nota, kwitansi, foto/ dokumentasi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan selesai dilaksanakan.
- (3) Seluruh pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Walikota melalui Badan Keuangan Daerah atau Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tembusan Dinas Sosial paling lama 15 (lima belas) hari setelah kegiatan bedah rumah selesai.

#### **BAB V PENGAWASAN**

##### **Pasal 10**

- (1) Pengawasan dilaksanakan oleh desa/kelurahan dan Tim
- (2) Pengawasan dilakukan untuk memantau pekerjaan dilapangan mengenai kesesuaian dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan/atau terjadi penyimpangan yang menghambat pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB VI PELAPORAN**

### **Pasal 11**

- (1) Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang oleh tim tingkat desa/kelurahan diteruskan ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- (2) Pelaporan administrasi disertakan dengan foto/dokumentasi kegiatan; dan
- (3) Berita Acara Serah Terima dari Panitia Bedah Rumah Tidak Layak Huni Desa/Kelurahan kepada Penerima Bedah Rumah Tidak Layak Huni.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 12**

- (1) Membebaskan bantuan sosial bedah rumah tidak layak huni pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Selain anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bantuan sosial bedah rumah tidak layak huni dapat didanai melalui gotong royong masyarakat.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mencabut Perwali Nomor 19 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Dana Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni beserta Perubahannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 2017

WALIKOTA BATU,

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU

WIDODO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR

